

**EKSITENSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MEMBINA  
PANGLIMA LAUT DI ACEH SELATAN**

Skripsi

Diajukan Oleh:

**ADE DAMAN HURI  
NIM. 431307314**

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**2019**

**SKRIPSI**

**EKSITENSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MEMBINA  
PANGLIMA LAUT DI ACEH SELATAN**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program Sarjana dalam bidang  
Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

**ADE DAMAN HURI**

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

**NIM : 431307314**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**Dr. Mahmuddin, M.Si**  
NIP. 19721020 199703 1 002

**Khairul Habibi, M.Ag**  
NIDN. 2025119101

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah  
Jurusan Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:**

**Ade Daman Huri  
NIM. 421307314**

**Pada Hari/ Tanggal**

**Kamis, 31 Januari 2019 M  
25 Jumadil Awal 1440 H**

**Di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Mahmuddin, M.Si  
NIP. 19721020 199701 1 002**

**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag  
NIDN. 2025119101**

Penguji I,

Penguji II,

**Fakhruddin, SE., MM  
NIP. 19640616 201411 1 002**

**Rafhan, S.Sos.I., MA  
NIP. 19811107 200604 2 003**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Fakhri, S.Sos MA  
NIP. 19641129 199803 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Daman Huri  
Tempat/Tgl. Lahir : Lhok Pawoh, 21 Oktober 1994  
NIM : 431307314  
Jenjang : Sarjana  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis skripsi ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



  
Ade Daman Huri  
NIM. 431307314

AR-RANIRY

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan. dan untuk mengetahui peluang dan tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan sangat erat dimana Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan pembinaan secara rutin dalam kurun waktu 3 bulan sekali selain itu juga ikut dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi Panglima Laot dilapangan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan beragam, mulai dari pembinaan yang dilakukan dengan mendengarkan keluhan kesah dan juga ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi panglima laot, juga ikut memberikan bantuan peralatan penangkapan ikan, serta membangun pelabuhan dan akan terus membangun kominkasi secara intens dengan panglima laot. Adanya kemauan yang kuat dari panglima laot untuk menyelesaikan masalah dan juga mau mengutarakan keluhan yang dihadapi, adanya aturan yang menguatkan seperti Qanun sehingga dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi panglima laot. Serta peluang dari Kepala pemerintah daerah yang mendukung penuh upaya yang dilakukan untuk pembinaan panglima laot di wilayah Aceh Selatan. Serta hubungan kerjasama yang baik yang dilakukan selama ini sehingga menguatkan untuk melahirkan sinergi antar pemerintah dan panglima laot. Sedangkan tantangannya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan merasakan sarana dan prasaranan untuk mendukung pembinaan yang dilakukan msaih sangat terbatas, hal ini akan menghambat program kerja untuk terus membina panglima laot di wilayah Aceh Selatan. Dan juga komunikasi yang dibangun antar panglima laot dan dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan belum maksimal.

Kata kunci: *Eksistensi, Pembinaan, Panglima Laot*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jurusan Manajemen Dakwah (MD), dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul: “Eksistensi Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Membina Panglima Laut Di Aceh Selatan”. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Darmansyah dan Ibunda tercinta Siti Sara yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang

diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih. Selain itu juga buat saudara kandung, Kakak Daryana Sasra, Adek Agus Sartika, Adek Syahrul Fahrudi yang juga membuat motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Khairul Habibi, M.Ag sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Jailani, M.Si. sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Bapak Maimun Fuadi, M.Ag Sekretaris Jurusan yang selalu melayani kami (mahasiswa) dalam keperluan administrasi di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan kepada Bapak Dr. Fakhri, S.Sos sebagai Penasehat

Akademik (PA) Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

3. Kepada sahabatku tercinta Mukhrizal, dan kawan-kawan leting 2013 yang akan menjadi sarjana selanjutnya yang telah membantu semangat dan arahannya.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 11 Januari 2019  
Penulis,

**Ade Daman Huri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pembinaan .....	11
1. Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli.....	12
2. Fungsi Pembinaan.....	14
3. Karakteristik Pembinaan .....	15
B. Proses Pembinaan .....	16
1. Teknik Pembinaan .....	16
2. Strategi Pembinaan .....	17
3. Materi Pembinaan .....	19
4. Hasil Pembinaan .....	20
C. Panglima Laot.....	21
1. Sejarah Panglima Laot .....	24
2. Organisasi Panglima Laot/Lhok .....	25
3. Fungsi dan Peran Panglima Laot .....	29
D. Hukum Adat Laot .....	30
E. Masyarakat Nelayan .....	32
1. Pengertian Masyarakat Nelayan .....	32
2. Tipologi Nelayan .....	34
3. Kemiskinan Masyarakat Nelayan .....	37
F. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan .....	40
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43

C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
1. Observasi .....	44
2. Wawancara .....	44
3. Dokumentasi .....	45
D. Teknik Analisis Data .....	45

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
1. Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan .....	49
2. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan .....	53
3. Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	54
B. Deskripsi Keadaan Panglima Laot Kabupaten Aceh Selatan .....	58
1. Gambaran Panglima Laot Kabupaten Aceh Selatan .....	58
2. Tugas dan Fungsi Panglima Laot Kabupaten Aceh Selatan ....	59
C. Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima Laot .....	61
D. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima Laot.....	64
E. Peluang dan Tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima Laot .....	66
1. Peluang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima Laot .....	67
2. Tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima Laot .....	68

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki daerah pesisir yang sangat luas meliputi lebih dari 17.508 pulau besar dan kecil. Perairan laut Indonesia mencapai 5,1 juta kilometer adalah salah satu pantai terpanjang di dunia. Demografi dan kemaritiman inilah Indonesia menyimpan kekayaan alam laut yang besar, salah satunya sektor perikanan. Anugerah dan rahmat ini menjadi kebanggaan, di sisi lain nilai kekayaan seperti dimaksud benar-benar harus dapat digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir/nelayan.<sup>1</sup>

Untuk mendukung agar kekayaan laut ini tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara baik, diperlukan cara-cara dan strategi yang benar-benar tepat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Khusus di Aceh, strategi untuk melindungi kekayaan laut agar tetap terjaga dan selalu menyediakan sumber kebutuhan bagi kehidupan selanjutnya.<sup>2</sup>

Langkah yang dilakukan tersebut adakalanya melalui *haba peuingat* atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan *hadih maja* (sejenis pepatah, yang mengandung pesan moral). Selain melalui pesan-pesan moral, ditempuh pula melalui kelembagaan, yaitu mengadakan suatu institusi yang disebut dengan Panglima Laot dan untuk bagian wilayah kemukiman disebut dengan Panglima

---

<sup>1</sup> M. Adli Abdullah, dkk, *Aceh Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan*, (Banda Aceh: Pushal- KP, 2014), hal. 18.

<sup>2</sup> M. Adli Abdullah, dkk, *Aceh Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan...* hal. 20.

Laot Lhok. Bedanya, Panglima Laot memiliki wilayah kekuasaan lebih luas, yaitu meliputi tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi, sementara Panglima Laot Lhok dikhususkan untuk wilayah kecamatan atau tingkat kemukiman.

Lembaga Panglima Laot Lhok di wilayah kecamatan/kemukiman merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola *hukom adat laot*.<sup>3</sup> Menurut Snouck Hurgronje, awalnya panglima laot sebagai sultan khusus mewadahi tentang kelautan, terutama masalah keamanan terhadap serangan pihak asing.<sup>4</sup>

Paparan di atas menunjukkan bahwa keberadaan panglima laot di samping sebagai pemimpin adat laut atau hukum laut juga memiliki peran besar terhadap kehidupan sosial. Peran terhadap kehidupan sosial ini tidak saja berkenaan dengan aktifitas sosial namun dipahami juga sebagai lembaga paling terdepan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pemahaman ini tentu sangat mungkin, mengingat lembaga ini sudah menentukan keberadaannya melalui Keputusan Hasil Pertemuan/Musyawarah Lembaga Adat Laot/Panglima Laot se-Aceh di Darussalam, Banda Aceh pada tanggal 6 Juni Tahun 2000.<sup>5</sup>

Setelah keputusan musyawarah panglima laot se-Aceh, Gubernur mendukung dan menindak lanjuti melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 523.11/012/2005 pada tanggal 8 Maret 2005, disebutkan bahwa mengukuhkan Panglima Laot beserta Panglima Laot Lhok dilakukan dalam rangka menyukseskan pembangunan subsektor perikanan,

---

<sup>3</sup> M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan*, (Jakarta: Yayasan KEHATI, 2006), hal. 33.

<sup>4</sup> Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, jilid 1, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hal. 237.

<sup>5</sup> M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan...*, hal. 163.

dengan tugas dan wewenang dalam kedudukannya sesuai adat membantu tugas pemerintah dalam pembangunan bidang subsektor perikanan dan masyarakat nelayan dalam arti luas.<sup>6</sup> Tidak hanya itu, sebagai lembaga adat dalam tatanan masyarakat Aceh, dilahirkan lagi Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua Qanun ini memang tidak memiliki perbedaan jauh, intinya secara formal dan legalitas, lembaga Panglima Laot sudah semakin kuat dengan beberapa regulasi di atas.<sup>7</sup>

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1 poin 23 Panglima Laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Secara sederhana pasal tersebut memberi pengertian bahwa Panglima Laot sebagai lembaga yang dapat mewadahi masyarakat pesisir dalam bentuk kesejahteraan.<sup>8</sup>

Pandangan berbeda disebutkan pula bahwa nelayan tradisional Indonesia khususnya di Aceh, sangat banyak jumlahnya, oleh sebab itu membaiknya kesejahteraan mereka, maka telah mengentaskan kemiskinan dalam jumlah besar.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, keberadaan dan fungsi Panglima Laot sewajarnya dapat melembaga sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui kerjasamanya dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta.

Terlebih lagi peran pemerintah dalam memfungsikan Panglima Laot tidak setengah-setengah, proaktif pemerintah setempat dalam memperjuangkan hak-hak

---

<sup>6</sup> Usman Cut Raja, *Antara Panglima Laot dan Nelayan*, [http:// www. acehnationalpost. com/opini/2483-antara-panglima-laot-dan-nelayan.html](http://www.acehnationalpost.com/opini/2483-antara-panglima-laot-dan-nelayan.html), diakses pada 08 Oktober 2015.

<sup>7</sup> M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan...*, hal. 163

<sup>8</sup> M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan...*, hal. 163

<sup>9</sup> M. Adi Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan...*, hal. 164.

nelayan melalui kerjasama dengan Panglima Laot harus digarap sedemikian rupa agar terjalin koordinasi yang baik sampai ke masyarakat nelayan. Pemerintah harus mengakui dengan sesungguhnya bahwa, posisinya sebagai pemegang kekuasaan yang dapat membuat dan menentukan dapat berpikir bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan. Hal inilah yang mengharuskan untuk mengoptimalisasikan peran dan fungsi Panglima Laot sebagai lembaga yang dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan khususnya masyarakat nelayan.

Dasar pembentukan lembaga adat ini menurut Jakfar Puteh, disamping untuk melestarikan nilai dan kaedah yang tumbuh bersama dengan pertumbuhan masyarakat Aceh namun secara pragmatisnya lembaga ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari pihak penguasa *stakeholders* untuk membantu kelancaran administrasi pemerintahan dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat nelayan. Bagaimana adat istiadat dan lembaga-lembaga adat di Aceh dapat kembali eksis dan ditumbuhkembangkan pada masa sekarang ini menjadi masalah penting ditengah kehidupan masyarakat yang saat ini menganut prinsip globalisasi. Pada dasarnya adat dan hukum adat telah mampu mengatur kehidupan sosial masyarakat Aceh di masa lalu sehingga dapat mendatangkan kejayaan.<sup>10</sup>

Dalam hal pembinaan Panglima laot sudah tentu tanggung jawab yang besar dari pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti halnya di Aceh Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan memiliki tugas sebagai berikut: (1) Pembinaan umum dibidang kelautan dan perikanan. (2) Pembinaan

---

<sup>10</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial: Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, ( Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 50-51.

teknis. (3) Pembinaan izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan sesuai dengan tugas pokoknya. (4) Pemberdayaan masyarakat pantai. (5) Penelitian dibidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah. (6) Penyajian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran. (7) Penyelenggaraan pendidikan, latihan, penetapan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan. (8) Penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut. (9) Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan. (10) Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut. (11) Pelaksanaan kerjasama kelautan dan perikanan antar daerah maupun dengan masyarakat Internasional tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, apa yang dinilai sangat penting karena dengan adanya keberadaan dan eksistensi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan sangat mendukung dalam membina Panglima laot yang menjadi tanggung jawab kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan ditambah lagi pembinaan Panglima laot mejadi tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang tercantum dalam point ke empat dalam tugasnya.

Namun pada kenyantaannya Panglima Laot Aceh Selatan belum merasakan secara maksimal mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Parawisata dan Kelautan Kabupaten Aceh Selatan, seperti halnya fasilitas yang tidak memadai, jaminan keselamatan tidak jelas dan pembinaan-pembinaan lainnya yang dirasakan belum memenuhi ekpektasi dari panglima laot, secara umum posisi/wewenang panglima laot telah dipaparkan, namun kurang

mengangkat kondisi nyata dari panglima laot di Aceh Selatan yang menjadi fokus penelitian ini, sehingga peneliti merasa perlu melihat peran/eksistensi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina panglima laot oleh sebab itu penulis tertarik melihat lebih dalam yang penulis tuangkan dalam judul skripsi “Eksistensi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Membina Panglima Laut di Aceh Selatan”

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang di angkat oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apa saja peluang dan tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

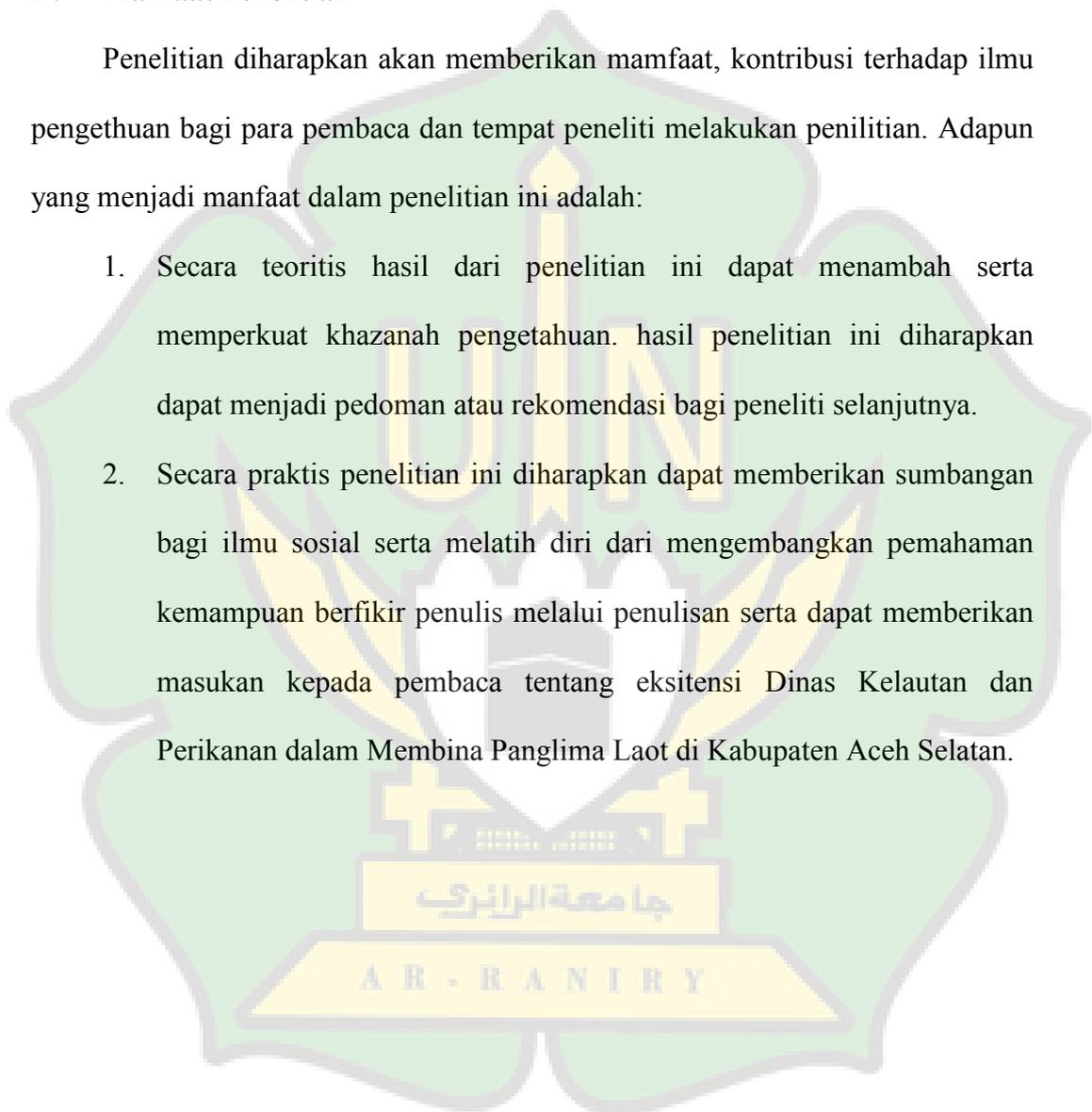
1. Untuk mengetahui keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan.

3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan akan memberikan mamfaat, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan tempat peneliti melakukan penelitian. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat menambah serta memperkuat khazanah pengetahuan. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu sosial serta melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui penulisan serta dapat memberikan masukan kepada pembaca tentang eksistensi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Membina Panglima Laot di Kabupaten Aceh Selatan.



## E. Penjelasan Istilah

### 1. Eksistensi

Dalam kamus bahasa Indonesia eksistensi adalah berada atau keberadaan,<sup>11</sup> eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan berhenti, melainkan lentur dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.<sup>12</sup> Adapun eksistensi yang dimaksud dalam penelitian adalah keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap perannya dalam membina Panglima Laot Aceh Selatan.

### 2. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu dinas dibawah pemerintahan daerah, dinas ini merupakan organisasi formal yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan wilayah Kabupaten Aceh selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan beralamat di Jl T. Cut Ali, No. 261, Lhok Bengkuang, Lhok Bengkuang, Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23711, Indonesia.

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007)

<sup>12</sup> <http://digilib.unila.ac.id/4230/14/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 23 November 2018

### 3. Membina

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang di berikan untuk dapat hidup mandiri.

### 4. Panglima Laot

Panglima Laôt (atau Panglima Laot) merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt. Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu *uleebalang*, sekarang pemerintah daerah).

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada lima bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah/definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang kajian gambaran umum mengenai eksistensi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Membina Panglima Laot di Kabupaten Aceh Selatan yang meliputi: pengertian eksistensi, pola pembinaan, pengertian Panglima laot, sejarah Panglima laot di Aceh, tugas dan fungsi Panglima laot, dan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bab tiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya deskripsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan, peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan, dan peluang dan tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan.

Bab lima, merupakan bab penutup yaitu didalamnya berisikan hanya kesimpulan dan saran.



Kesehatan mental adalah kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa. Kedua hal tersebut bagi manusia sangat penting, karena cerminan manusia adalah terletak pada mentalnya. Jika manusia telah mengalami tidak sehat mentalnya, menurut hasil penelitian, akan mempengaruhi keseluruhan hidupnya.

### **1. Pengertian Pembinaan Menurut Ahli**

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah: “Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.<sup>14</sup>

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>14</sup> Musanef, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hal.

pendapat Miftah Toha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa:

- a. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
- b. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
- c. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
- d. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.<sup>15</sup>

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah: “Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.<sup>16</sup>

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

<sup>15</sup> Miftah Toha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 17

<sup>16</sup> Musanef, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hal.

## 2. Fungsi Pembinaan

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk:

- a. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
- b. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- d. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
- e. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).<sup>17</sup>

## 3. Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya *Pembinaan Organisasi* mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu:

- a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.

---

<sup>17</sup> Musanef, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, hal. 11

- b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
- c. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- d. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
- e. Mempergunakan model “*action research*”.
- f. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- g. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- h. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.<sup>18</sup>

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

## **B. Proses Pembinaan**

### **1. Teknik Pembinaan**

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini tidak

---

<sup>18</sup> Miftah Toha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, hal. 19

hanya untuk mencapai efisiensi, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.

Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu:

- a. Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku). Teknik yang sifatnya relatif dan terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan.
- b. Teknik Perencanaan (*planning strategy*). Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan.
- c. Teknik Sistematis dan Terstruktur. Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam

lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.

- d. Teknik *Inkrementalisme Logis*. Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jells mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya.<sup>19</sup>

Atas dasar itu, maka salah satu alternatif harus dipilih atau sudah menentukan pilihannya daripada beberapa alternatif itu.

## **2. Strategi Pembinaan**

Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari dua perspektif yang berbeda dari perspektif apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dan juga dari perspektif apa yang pada akhirnya dilakukan oleh sebuah organisasi. Dari perspektif yang pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi serta melaksanakan fungsinya. Kata “program” menyiratkan adanya peran yang aktif, yang disadari dan yang rasional dalam merumuskan strategi. Dari perspektif yang ke dua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Menurut Robert H. Hayes yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mengidentifikasi lima ciri utama dari strategi pembinaan (*directing strategy*), yaitu:

---

<sup>19</sup> Alfonsus Sirait, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal. 76

- a. Wawasan waktu (*time horizon*). Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.
- b. Dampak (*impact*). Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti.
- c. Pemusatan Upaya (*concentration of effort*). Sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.
- d. Pola Keputusan (*pattern decision*). Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.
- e. Peresapan. Suatu strategi mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu, dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut. Menurut Mintberg dalam bukunya *Strategy Making in Three Model* yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mendefinisikan tentang strategi pembinaan adalah, bahwa: “Strategi pembinaan merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan

---

<sup>20</sup> Alfonsus Sirait, *Manajemen*, hal. 78

metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program tersebut terlaksana”.<sup>21</sup>

### 3. Materi Pembinaan

Materi pembinaan mencakup mengenai pengaturan sumber-sumber yang diperlukan, antara lain : pegawai, biaya (money), peralatan (equipment), bahan-bahan/perlengkapan (material), waktu yang diperlukan (time will be needs), hal tersebut harus sudah tersedia bila diperlukan.

Materi pembinaan yang meliputi bagaimana mengalokasikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan cara-cara mengorganisasikannya, sehingga bahan-bahan pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam pelaksanaannya. Materi pembinaan sangat diperlukan dalam persiapannya baik dalam bentuk standar atau formulir yang dapat digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang penting daripada kegiatan tersebut.

Menurut pendapat Soewarno Handayaniingrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen menjelaskan pengertian Materi, bahwa: “Materi adalah merupakan bentuk standar atau formulir lisan yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal penting yang dipraktekkan harus dengan jelas dan teliti, yang merupakan catatan informasi dalam bentuk standar yang penyampaiannya diatur secara rapi sebagai dokumen informasi”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Alfonsus Sirait, *Manajemen*, hal. 82

<sup>22</sup> Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), hal. 97

Materi merupakan suatu sumber nilai dan merupakan sumber data setelah diolah menjadi sumber informasi yang kemudian diatur, dinilai, sehingga mudah untuk dijadikan bahan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya diperlukan adanya system pencatatan informasi dan penyimpanan (filling and record system) yang sewaktu-waktu dapat digunakan dalam suatu kegiatan berikutnya.

#### **4. Hasil Pembinaan**

Pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Hasil pembinaan adalah spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Pada suatu deretan, fakta-fakta dan pandangan untuk waktu yang akan datang, maka harus menyimpulkan apa yang akan mempengaruhi tujuan dari kegiatan tersebut “hasil yang akan dicapai”.

Jelasnya, hasil pembinaan dengan maksud/tujuan untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah merupakan suatu pertimbangan yang pokok dalam halnya pengambilan keputusan, maka efisiensi sangat diperlukan, karena efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antar input dan output (hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan) jadi tujuan hasil pembinaan adalah untuk mencapai efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna).

Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayaniingrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen

menjelaskan pengertian efisiensi, yaitu: *“The ratio of input to output, benefit to cost (performance to be use of resources), as that which maximizes result with limited resources. In other words, it was the relation between what is accomplished and what might be accomplished”*. (perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dengan biaya (antar hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil maximum yang dicapai dengan penggunaan sumber uang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.<sup>23</sup>

### C. Panglima Laot

Dalam Andri Kurniawan, disebutkan bahwa panglima laot adalah suatu lembaga yang memimpin kawasan-kawasan lhok. Kata “lhok” itu sendiri bermakna satuan lokasi nelayan tempat melabuh perahunya.<sup>24</sup> Menurut pengertian ini terdapat perbedaan antara panglima laot dengan panglima laot lhok. Panglima laot memiliki criteria tugas yang besar dari lhok yang hanya memiliki kewenangan terhadap suatu kawasan. Begitupun dalam hal penyelesaian sengketa terhadap para nelayan, kewenangan panglima laot lebih besar dibandingkan kewenangan panglima laot lhok dalam memutuskan perkara.

Khusus di Aceh, kehadiran panglima laot merupakan suatu nilai lebih dalam kehidupan adat masyarakat pesisir atau dalam kehidupan masyarakat nelayan. Sebagaimana disebutkan dahulu kehadiran panglima laot sampai pada wilayah

---

<sup>23</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, hal. 98

<sup>24</sup> Andri Kurniawan, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang*, Jurnal, Vol 8, 3 September, 2008, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 205.

lhok untuk mengatur kehidupan mereka sebagai nelayan. sementara untuk lembaga adat masyarakat nelayan dikenal dengan sebutan lembaga hukum adat laot yang diketua oleh seorang panglima laot yaitu orang yang memimpin adat dan kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.<sup>25</sup>

Dalam sumber berbeda, panglima laot atau panglima laot lhok merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat laot. Hukum adat laot dikembangkan berbasis Syariat Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antara nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu Ulee Balang, sekarang pemerintah daerah).<sup>26</sup>

Dalam lingkungan sosial, seorang panglima laot berkedudukan sebagai pemimpin teratas dari persekutuan adat laot dan orang terkemuka di antara para nelayan khusus bagi seorang lhok atau kabupaten. Selain itu mempunyai pengetahuan lebih tentang seluk beluk kelautan dan telah berpengalaman sebagai pawang laot dan tentu saja menguasai dan memahami ketentuan hukum adat laot secara menyeluruh.

Tugas, wewenang, hak dan kewajiban panglima laot dalam kedudukannya sebagai pengetua persekutuan masyarakat adat nelayan, mengawasi agar semua

---

<sup>25</sup> Titit Lestari, *Sistem kerja Tradisional Nelayan Lampulo Banda Aceh: Jurnal Hasil Penelitian Kesejarahan dan Nilai Tradisional*, dalam SUWA, Penyunting, Adnan Abdullah, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2007), hal. 32.

<sup>26</sup> M. Adi Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan*, (Jakarta: Yayasan KEHATI, 2006), hal. 54.

ketentuan-ketentuan adat-istiadat dan hukum adat laot dipatuhi dan ditaati oleh semua anggota persekutuan. Memimpin masyarakat nelayan yang berada diwilayah kekuasaanya. Mempertahankan adat-istiadat dan menerapkan hukum adat laot, menjatuhkan sanksi adat, terhadap anggota nelayan yang melanggar ketentuan adat laot dan mengurus, mengatur dan melaksanakan upacara-upacara adat. Melaksanakan pertemuan-pertemuan/mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang, meningkatkan taraf kehidupan nelayan. mengelola harta kekayaan milik persekutuan. Mengadakan koordinasi dengan pawang pukat, panglima laot baik di tingkat lhok, kabupaten ataupun provinsi dan instansi pemerintah.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan, kata “lhok” ini menunjukkan suatu lokasi pelabuhan nelayan atau teluk, atau muara, sehingga ada sebutan lhok. Atau dapat juga dipahami sebagai sebuah wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan serta dipimpin oleh seorang yang dipilih dari kalangan yang dituakan untuk memimpin wadah masyarakat nelayan (panglima laot lhok). Setiap panglima laot lhok memiliki wilayah kelola laut penangkapan dan tempat pendaratan ikan (di wilayah pantai atau pesisir).

### **1. Sejarah Panglima Laot**

Menurut sejarahnya panglima laot telah ada sejak 400 tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang memerintah kerajaan Islam Aceh. Saat itu panglima laot bertugas, pertama, memungut cukai

---

<sup>27</sup> Syamsudin Daud, *Adat Meulaot; Adat Menangkap Ikan di Laut*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2010), hal. 54.

pada kapal-kapal yang singgah di pelabuhan dan kedua, memobilisasi rakyat terutama nelayan untuk berperang.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dimana kerajaan sudah dileburkan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas Panglima Laot mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran dilaut. Tetapi dari masa itu sampai dengan tahun 1982, panglima laot masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, baik di desa, mukim ataupun kecamatan atau dikenal dengan Panglima Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu panglima laot belum begitu dikenal oleh orang banyak.

Tahun 1982, di Kota Langsa, Aceh, digelar suatu pertemuan antar panglima laot lhok se Aceh. Pertemuan ini kemudian menyetujui pembentukan panglima laot kabupaten. panglima laot kabupaten diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antar 2 panglima laot lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh panglima laot lhok tetapi bukan sifatnya banding seperti pengadilan biasanya.

Pada tahun 2000, di Banda Aceh dan Sabang dilaksanakan pertemuan serupa. Pertemuan-pertemuan itu menyepakati ada satu panglima laot lagi di tingkat provinsi. Maka dibentuklah panglima laot Aceh. Sejak di bentuk, Panglima laot Aceh diberi tugas untuk mengkoordinasikan hukum adat laot, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi

kebijakan kelautan dan perikanan termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh termasuk bagi nelayan yang terdampak.

Pasca tsunami 26 Desember 2004, tahun 2006 panglima laot mendapat pengakuan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e), kemudian Undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama panglima laot diterima menjadi anggota *World fisher forum people* (WFFP) pada tahun 2008.<sup>28</sup>

## **2. Organisasi Panglima Laot/ Lhok**

Organisasi panglima laot berada dalam suatu wilayah dimana para nelayan berpangkalan dan masyarakat nelayan berdomisili. Pada masa dahulu wilayah kekuasaan panglima laot disebut lhok yaitu menguasai satu gampong, beberapa gampong (*mukim*) dan kecamatan atau satu kepulauan pantai dimana nelayan berdomisili dan melakukan usaha penangkapan ikan. Saat ini wilayah kekuasaan panglima laot semakin luas hingga berkembang menjadi tiga tingkatan yaitu panglima laot lhok, panglima laot kabupaten/kota dan panglima laot provinsi.

Susunan keorganisasian panglima laot lhok yaitu sebagai berikut;

- a. 3 Orang penasehat
- b. 1 Orang ketua/panglima laot
- c. 1 Orang wakil ketua

---

<sup>28</sup> M. Adli Abdullah, dkk, *Aceh Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan*, (Banda Aceh: Pushal- KP, 2014), hal.174.

- d. 1 Orang sekretaris
- e. 1 Orang bendahara
- f. 1 Orang wakil bendahara.<sup>29</sup>

Sedangkan susunan keorganisasian panglima laot tingkat kabupaten/kota yaitu terdiri dari:

- a. 3 Orang penasehat
- b. 1 Orang ketua/panglima laot
- c. 1 orang wakil ketua
- d. 1 orang sekretaris
- e. 1 orang bendahara.<sup>30</sup>

Terakhir, susunan keorganisasian panglima laot yang berada pada tingkat provinsi terdiri dari:

- a. 3 Orang penasehat
- b. 1 Orang ketua/panglima laot
- c. 4 Orang wakil ketua
- d. 1 Orang sekretaris
- e. 1 Orang wakil sekretaris
- f. 1 Orang bendahara
- g. 1 Orang wakil bendahara
- h. Para anggota.<sup>31</sup>

Struktur keorganisasian panglima laot juga juga dilengkapi dengan lembaga persidangan hukom adat laot, yang berperan dalam mengeluarkan tata cara dan

<sup>29</sup> M. Adi Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan...*, hal. 164.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 165.

<sup>31</sup> *Ibid.*

peraturan penangkapan ikan di laut.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan fungsinya, panglima laot mempunyai tugas sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yaitu:

- a. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan adat laot,
- b. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut,
- c. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara sesama anggota nelayan atau kelompoknya,
- d. Mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laot,
- e. Menjaga/mengawasi agar pohon-pohon ditepi pantai tidak ditebang, sehingga ikan akan menjauh ketengah laut,
- f. Merupakan badan penghubung antar nelayan dengan pemerintah dan panglima laot dengan panglima laot lainnya,
- g. Meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat pesisir.

Menyangkut dengan proses pemilihan panglima laot, antara lhok, kabupaten/kota dan provinsi, hampir-hampir sama. Proses pemilihan panglima laot lhok berurut sebagai berikut:

- a. Dipilih untuk masa waktu 10 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan,
- b. Pemilihan dilakukan secara musyawarah atau mufakat,
- c. Calon sedikitnya 5 orang, dipilih oleh pawing-pawang yang ada dalam wilayah lhok yang bersangkutan, dengan persyaratan: taat beragama, pernah menjadi pawang, bisa membaca dan menulis, berdomisili di wilayah kerja lhok tersebut, usia minimal 25 tahun,
- d. Forum dianggap sah bila dihadiri 2/3 dari jumlah pawing-pawang yang ada di daerah yang bersangkutan, disaksikan oleh pembina (Dinas Perikanan dan Camat),
- e. Calon yang memperoleh suara terbanyak ke-1 langsung menjadi Panglima Laot, suara terbanyak ke-2 berikutnya menjadi wakil, suara terbanyak ke-3 menjadi sekretaris, terbanyak ke-4 menjadi bendahara dan terbanyak ke-5 menjadi wakil bendahara.<sup>33</sup>

Sedangkan proses pemilihan panglima laot kabupaten/kota adalah:

- a. Dipilih untuk masa waktu 5 tahun,
- b. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat,

<sup>32</sup> Zahrina, Seri Informasi Budaya "Panglima Laot" Organisasi Kemaritiman Tradisional di Aceh, (Banda Aceh: Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2014) hal.2.

<sup>33</sup> M. Adli Abdullah, dkk, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan...*, hal. 168.

- c. Calon sedikitnya 4 orang, dipilih oleh Panglima laot lhok yang ada dalam wilayah kabupaten/kota, ada dukungan dari pemilih, usia minimal 40 tahun dan bersedia calon dengan pernyataan tertulis,
- d. Pengalaman cukup di bidang laut sebagai panglima laot,
- e. Forum dianggap sah bila dihadiri 2/3 dari jumlah panglima laot lhok yang ada dalam kabupaten/kota yang bersangkutan, disaksikan oleh pembina (Bupati dan Kepala Dinas Perikanan),
- f. Calon yang memperoleh ke-1 langsung menjadi panglima laot, suara terbanyak ke-2 berikutnya menjadi wakil, suara terbanyak ke-3 menjadi sekretaris, suara terbanyak ke-4 menjadi bendara.<sup>34</sup>

Sementara proses pemilihan panglima laot provinsi:

- a. Dipilih untuk masa waktu selama 5 tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan,
- b. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat,
- c. Calon sedikitnya 5 orang, dipilih oleh panglima laot kabupaten/kota yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan persyaratan: taat beragama, berpengalaman dalam bidang penangkapan dan kenelayanan, bisa membaca dan menulis, berdomisili di Provinsi Aceh, ada dukungan dari pemilih (panglima laot kabupaten/kota), kesediaan calon dengan pernyataan tertulis,
- d. Forum dianggap sah bila dihadiri 2/3 dari jumlah Panglima Laot kabupaten/kota yang bersangkutan, disaksikan oleh pembina (Gubernur dan Kepala Dinas Perikanan Aceh) calon yang memperoleh suara terbanyak ke-1 langsung menjadi Panglima Laot, suara terbanyak ke-2 berikutnya menjadi wakil, suara terbanyak ke-3 menjadi sekretaris, terbanyak ke-4 menjadi bendahara, dan terbanyak ke-5 menjadi anggota, (6) apabila jumlah suaranya sama dalam pemilihan tersebut, maka keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.<sup>35</sup>

### 3. Fungsi dan Peran Panglima Laot

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa Panglima Laot adalah perpanjangan tangan sultan dalam rangka menunaikan dua hal, yakni pertama memungut cukai dari kapal-kapal dagang dipelabuhan dan memobilisasi rakyat dalam peperangan. Namun seiring perubahan zaman, peran panglima laot ini terus

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 167.

<sup>35</sup> *Ibid.*... hal. 168

mengalami pergeseran. Hal ini, salah satu disebabkan oleh kondisi sosial budaya politik yang juga terus mengalami perkembangan.

Panglima Laot tidak lagi merupakan perpanjangan tangan sultan. Panglima laot lebih berupa pemimpin adat kaum nelayan yang mengatur segala praktek kenelayanan dan kehidupan sosial yang terkait dengan semua aktivitas melaut masyarakat nelayan disuatu wilayah.<sup>36</sup> Adapun secara spesifik fungsi dan peran yang diemban oleh masing-masing Panglima laot adalah:

a. Panglima Laot Lhok

- 1) Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
- 2) Memantu pemerintah dalam idang perikanan dan kelautan;
- 3) Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
- 4) Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
- 5) Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
- 6) Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

b. Panglima Laot kabupaten/kota

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat lintas lhok;
- 2) Menyelesaikan sengketa antar panglima laot lhok.

c. Panglima Laot Provinsi

- 1) Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- 2) Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.<sup>37</sup>

Hasil uraian di atas menggambarkan bahwa peran dan fungsi panglima laot dengan panglima laot lhok tidaklah begitu jauh, sebab keduanya merupakan lembaga yang mewadahi kehidupan masyarakat yang sama. Institusi lembaga adat laot ini menjadi nuansa tersendiri dalam kehidupan masyarakat nelayan sebagai

<sup>36</sup> Syamsuddin Daut, *Adat Meulaot*, Cet ke 2 (Banda Aceh: CV. Baboen Jaya), hal. 44.

<sup>37</sup> Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV. Baboen Jaya, 2013), hal. 16.

perserikatan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera secara ekonomi dan berdaya secara sosial.

#### **D. Hukum Adat Laot**

Secara umum ketentuan ketentuan adat yang memuat sanksi hukum bagi pelanggarnya maka dikategorikan sebagai hukum adat, sebaliknya jika ketentuan adat tidak memuat atau memberi sanksi hukum bagi pelanggarnya maka dikatakan sebagai adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum adat laot dapat diartikan sebagai serangkaian kaidah yang diperuntukkan bagi sekelompok orang yang menggunakan laut sebagai tempat mencari nafkah.<sup>38</sup>

Kaedah itu berisi ketentuan bagaimana menggunakan laut sebagai tempat mencari nafkah terutama oleh nelayan. Sebagai hukum adat, maka hukum ini sebagai hukum yang paling hidup dan ditaati oleh masyarakat Aceh khususnya dilingkungan bidang penangkapan ikan dilaut.

Para nelayan umumnya mentaati ketentuan-ketentuan adat sebagai suatu kewajiban, kondisi ini di sebabkan masyarakat Indonesia menghormati dan mentaati hukum adat, karena mentaati hukum adat sama dengan menghormati diri sendiri dan masyarakat. oleh karena mentaati adat merupakan suatu keharusan yang jika tidak demikian akan dianggap sebagai orang yang tidak tau adat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam M. Adli Abdullah mengemukakan paling tidak ada empat alasan dari fenomena ini, antara lain; *Pertama*, Hukum adat pasti ada. Hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan warganya secara proporsional; *Kedua*, Pada masyarakat yang

---

<sup>38</sup> Syamsuddin Daud, Mifachuddin Cut Adek, *Adat Meulaot*, Cet 2 (Banda Aceh: Baboen Jaya), hal. 34.

sedang mengalami perubahan sosial yang relative cepat tetapi terarah, peranan hukum adat lebih menonjol dari hukum tertulis; *Ketiga*, Didalam kebudayaan majemuk seperti Negara Indonesia, eksistensi kebudayaan-kebudayaan khusus tidak mungkin diabaikan dalam kehidupan bangsa dan Negara; *Keempat*, pola-pola dalam hukum adat dapat digunakan untuk melembagakan hukum tertulis.<sup>39</sup> Atas pemahaman yang demikian, dapat dikemukakan bahwa kedudukan dan peranan hukum adat dalam sistematika visual dan tatanan hukum tidak kalah penting dengan unsur-unsur sistem hukum lainnya.

Hukum adat laot di Aceh, merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan diwilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut didaerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah hukum adat tersebut harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah itu (hak ulayat laut). Wilayah perairan laut Aceh terdapat sejumlah aturan penangkapan ikan dan bagi hasil ikan. Aturan tersebut tetap menjadi hukum adat bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan di daerah itu.<sup>40</sup>

Masyarakat nelayan di Aceh Besar mengenal adanya berbagai macam pantangan yang tidak boleh dilaksanakan selama sebelum dan sesudah pergi ke laut. Pantangan ini bermaksud agar selama mereka melakukan pekerjaan di laut mendapat rezeki melimpah dan selalu dilindungi Allah SWT sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan anggota keluarga mereka. Apabila ada nelayan yang melanggar pantangan berarti akan mengundang mara bahaya, baik ketika mereka melakukan aktivitas di laut maupun bagi keluarga yang mereka

---

<sup>39</sup> M. Adli Abdullah, dkk..., hal. 24.

<sup>40</sup> *Ibid.* hal. 65.

tinggalkan. Selain itu ada denda yang harus dibayar apabila mereka melangkahi terhadap pantangan yang telah diberlakukan. Denda yang berupa uang akan dikelola oleh panglima laot lhok dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>41</sup>

## **E. Masyarakat Nelayan**

### **1. Pengertian Masyarakat Nelayan**

Satuan konsep masyarakat nelayan terdiri atas dua unsur, yaitu masyarakat dan nelayan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, saling berinteraksi antar sesama warganya, memiliki adat-istiadat, norma-norma serta aturan-aturan yang mengatur semua pola tingkah laku warganya dan memiliki rasa identitas yang mengingat semua anggota masyarakatnya tanpa kecuali.<sup>42</sup>

Nelayan sendiri dalam BPP-PSPSL UNRI, dibedakan menjadi dua, yakni nelayan modern dan nelayan tradisional. Perbedaan keduanya tentu jelas bahwa nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan alat-alat tangkap modern dan lebih berorientasi terhadap keuntungan yang besar walaupun harus mengorbankan lingkungan. Sedangkan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan

---

<sup>41</sup> Agus Budi Wibowo, dkk, *Sistem Pengetahuan Kenelayanan pada Masyarakat Nelayan Aceh Besar*, (Banda Aceh: BKSNT,2000), hal. 53.

<sup>42</sup> Alkausar M, *Keterancaman Ritual Mappandesasi dalam Masyarakat Nelayan Etnik Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara*. [tesis].dipublikasikan. Denpasar Universitas Udayana.hal 187. Dapat diunduh dari [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf). diakses pada 29 Agustus 2018.

alat tangkap sederhana yang bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup (subsisten).<sup>43</sup>

Kemudian nelayan tradisional biasanya masih memegang erat nilai dan norma yang berlaku pada masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut biasanya tertuang dalam aturan-aturan berdasarkan tradisi dan adat-istiadat setempat. Aturan-aturan tersebut biasanya berupa larangan menggunakan alat tangkap tertentu atau larangan untuk melaut pada hari-hari tertentu. Nilai-nilai tersebut juga diimplementasikan dalam ritual-ritual atau upacara-upacara tertentu yang biasanya dilakukan untuk menghormati laut sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat nelayan.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.<sup>44</sup> Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dijaga dan dijalankan.

Nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Nelayan di dalam Ensiklopedi Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan

---

<sup>43</sup> BPP-PSPSL UNRI, Kajian Kearifan Lokal Masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, 2008. Dapat diunduh dari: [http:// www. coremap. or. id/ downloads/kearifan\\_ lokal\\_ masyarakat\\_ ds\\_ sabang\\_ mawang.pdf](http://www.coremap.or.id/downloads/kearifan_lokal_masyarakat_ds_sabang_mawang.pdf). diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.

<sup>44</sup> Hasan Sadly, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1980), hal. 31.

penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.<sup>45</sup> Nelayan merupakan suatu pekerjaan menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh seseorang. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal di desa pesisir.

## 2. Tipologi Nelayan

Tipologi dapat diartikan sebagai pembagian masyarakat ke dalam golongan-golongan menurut kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam tipologi masyarakat nelayan dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap yang dimiliki nelayan.

Dalam sudut pandang ini, nelayan bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan nelayan yang mempunyai alat-alat produksi sendiri (pemilik alat produksi) dan golongan nelayan yang tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri (nelayan buruh), dalam hal ini nelayan buruh hanya dapat menyumbang jasa tenaganya dalam kegiatan menangkap ikan serta mendapatkan upah yang lebih kecil dari pada nelayan pemilik alat produksi.

- b. Dari segi skala investasi modal usahanya.

Nelayan yang di pandang dari sudut pandang ini dapat di golongkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar yang memberikan modal investasi dengan

---

<sup>45</sup> Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru , 1983), hal. 133.

jumlah yang banyak untuk kegiatan menangkap ikan dan nelayan kecil yang hanya bisa memberikan modal investasinya dengan jumlah yang sedikit.<sup>46</sup>

c. Berdasarkan tingkat teknologi peralatan tangkap ikan

Berdasarkan teknologi peralatan tangkap ikan, nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern cenderung lebih menggunakan teknologi canggih dan berpendapatan lebih besar dibandingkan dengan nelayan tradisional, ini dikarenakan nelayan modern wilayah produksinya dapat menjangkau perairan yang lebih jauh.<sup>47</sup>

Arif Satria menggolongkan nelayan menjadi 4 (empat) tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi. Keempat tingkatan nelayan tersebut adalah:

- 1) *Peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Nelayan ini masih menggunakan alat tangkap yang tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor dan masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.
- 2) *Post-peasant fisher*, dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapannya karena mempunyai daya tangkap lebih besar. Umumnya, nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah pesisir. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan sudah meluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga saja.
- 3) *Commercial fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang digunakan pun lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya.

---

<sup>46</sup> Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), hal. 53.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 54.

- 4) *Industrial fisher*, ciri nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri dinegara-negara maju, secara relatif lebih padat modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu, dan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.<sup>48</sup>

Selain itu, secara lebih rinci, Kusnadi mengelompokkan ciri-ciri usaha nelayan tradisional, yaitu:

- 1) Teknologi penangkapan yang bersifat sederhana dengan ukuran perahu yang kecil, daya jelajah yang terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkau alat tangkap terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin ber-PK kecil;
- 2) Besaran modal usaha yang terbatas;
- 3) Jumlah anggota organisasi penangkapan kecil antara 2-3 orang, dengan pembagian peran bersifat kolektif (non -spesifik), dan umumnya berbasis kerabat, tetangga dekat, dan atau teman dekat;
- 4) Orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.<sup>49</sup>

Nelayan sebagai produser ikan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu (1) golongan nelayan kecil, dengan modal kecil atau bahkan dengan hanya bermodalkan tenaga kerja saja; (2) golongan nelayan menengah, dengan peralatan-peralatan sederhana seperti perahu kecil dan jala; dan (3) golongan

---

<sup>48</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2002), hal. 28-29.

<sup>49</sup> Kusnadi, *Kebudayaan Masyarakat Nelayan; Prosiding Jelajah Budaya Nasional*, Yogyakarta, 2010 hal 1215, dapat diunduh melalui situs [http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Budaya\\_Masyarakat\\_Nelayan-Kusnadi.pdf](http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Budaya_Masyarakat_Nelayan-Kusnadi.pdf), diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.

nelayan tertinggi, yang mempunyai peralatan-peralatan dan perlengkapan khusus yang cukup canggih dan seringkali mempunyai cara-cara atau usaha lain.<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani dalam pengelolaan atau dalam memanfaatkan lahan untuk mencari nafkah. Nelayan menghadapi sumberdaya yang tidak terkontrol dimana pada saat hasil tangkapan berkurang, maka nelayan tersebut harus mencari lahan baru. Artinya adalah nelayan lebih dipengaruhi oleh kondisi alam dan produktivitas tempat mereka mencari nafkah.

### **3. Kemiskinan Masyarakat Nelayan**

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit sosial yang ada dimasyarakat yang sampai saat ini sulit untuk mengatasinya. Kemiskinan secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian. Di mata sebagian ahli, kemiskinan acap kali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena yang ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup.

Menurut Soerjono Soekanto kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>51</sup> Dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan

---

<sup>50</sup> Alkausar M, *Keterancaman Ritual Mappandesasi dalam Masyarakat Nelayan Etnik Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara*. Denpasar, Universitas Udayana. Hal 187. Dapat diunduh dari: [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf), diakses pada tanggal 31 Agustus 2018.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 320.

hidup sehari-hari. Secara garis besar, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti; sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan.<sup>52</sup>

Menurut Raymond Firth dalam Bagong Suyanto, karakteristik yang menandai kehidupan nelayan miskin adalah:

- a. Pendapatan nelayan bersifat harian dan tak menentu dalam setiap harinya.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan para nelayan serta anak-anak dari keluarga nelayan yang menyebabkan para nelayan tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain
- c. Sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar bagi nelayan kepada pedagang atau pengepul hasil tangkapan (produk).
- d. Besarnya jumlah modal yang dikeluarkan dibidang usaha perikanan, menyebabkan para nelayan lebih memilih bergerak di bidang perikanan kecil-kecilan
- e. keluarga nelayan miskin umumnya sangat rentan dan mudah terjerumus dalam perangkap utang yang merugikan.<sup>53</sup>

Kehidupan keluarga nelayan khususnya nelayan kecil tidak bisa dipisahkan dengan kemiskinan. Sangat rendahnya tingkat kesejahteraan karena pendapatan yang tidak menentu setiap harinya dan hanya menggantungkan hidupnya terhadap hasil laut menyebabkan mereka digolongkan ke dalam masyarakat miskin. Berikut

---

<sup>52</sup> Bagong Suyanto, Karnaji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial; Ketika Pembangunan tak Berpihak kepada Rakyat Miskin*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 2.

<sup>53</sup> *Ibid*,...hal. 60.

adalah strategi pengentasan kemiskinan struktural nelayan yang dapat dijadikan pedoman bagi panglima laot lhok dan lembaga pemerintah lainnya, sebagaimana dalam tabel di bawah:

Tabel 4.1 Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural Nelayan

<b>Strategi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Program</b>
Modernisasi nelayan tradisional	Memberi kesempatan nelayan tradisional berubah status menjadi nelayan modern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan modal usaha</li> <li>2. Bantuan teknologi modern</li> <li>3. Pelatihan manajemen perikanan</li> </ol>
Revitalisasi nelayan tradisional	Memperkuat penyangga ekonomi dan posisi tawar nelayan tradisional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diversifikasi usaha non perikanan</li> <li>2. Bantuan modal usaha dan kebutuhan konsumsi di musim paceklik melalui kelompok-kelompok lokal yang sudah terbentuk</li> <li>3. Pemberdayaan perempuan dan lansia keluarga nelayan tradisional</li> </ol>

Sumber: Bagong Suyanto, 2005

Pilihan mana yang diambil dari dua jalan di atas, sudah barang tentu sangat tergantung kepada kemampuan sumber daya pemerintah dan sumber kondisi internal nelayan tradisional yang bersangkutan.

## **F. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan**

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur atau Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan elaporan di bidang kelautan dan perikanan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atau bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>54</sup>

## 3. Eksistensi

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa, dan bernegara. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan, dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis, dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut, dan pantai, energi non konvensional, dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak, dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis

---

<sup>54</sup> Diakses melalui <https://dkp.jatimprov.go.id/index.php/2017/04/10/tugas-pokok-dan-fungsi/> Pada tanggal, 29 November 2018

sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan, dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.<sup>55</sup>

Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas, dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut, dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut, dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan, dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang

---

<sup>55</sup> <https://kkp.go.id/setjen/perpustakaan> diakses pada tanggal 2 Desember 2018

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan, dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan, dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> <https://kcp.go.id/setjen/perpustakaan> diakses pada tanggal 2 Desember 2018

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian.<sup>57</sup> Ada beberapa unsur dalam penelitian yang harus ditentukan yaitu:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk katagori penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung kelokasi untuk memperoleh data, adapun jenis penelitiannya dengan model kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang diamati oleh peneliti.<sup>58</sup> Dari tujuan tersebut peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan tentang eksistensi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan dan lembaga Panglima laot Kabupaten Aceh Selatan. Adapun alasan mengambil lokasi ini adalah, peneliti melihat masih kurangnya penelitian tentang judul ini di lokasi yang peneliti ambil, sehingga menurut hemat penulis menjadi lokasi yang sangat cocok untuk di teliti.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Observasi

---

<sup>57</sup> Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Fiskologi UGM, 1993), hal. 124.

<sup>58</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2005, hal. 96.

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>59</sup>

Observasi juga suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam peneliti ini peneliti menggunakan observasi tidak berperan langsung (*non participant observation*) yaitu peneliti hanya melihat kehidupan dan aktivitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti mengobservasikan metode pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik dalam bentuk pelatihan, maupun pembinaan dalam bentuk praktek.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara sebagai bahan untuk mendukung atau penambahan data dari proses observasi yang terdiri dari dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.<sup>60</sup>

Penelitian ini menggunakan tanya jawab yang tidak terstruktur. Butiran pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan atau dianggap penting oleh sipeneliti. Peneliti menggunakan alat yang

---

<sup>59</sup>*Ibid...*, hal. 145.

<sup>60</sup> Husaini Usman , Purnomo Setiady..., hal. 57.

sesuai dengan kebutuhan penelitian ketika proses penelitian berlangsung. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Ketua Bidang yang bertanggung jawab melakukan pembinaan Panglima Laot dan Panglima laot Kabupaten Aceh Selatan.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa foto, buku, surat kabar, juga dalam bentuk film.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan juga data dari Panglima laot Kabupaten Aceh Selatan. Data yang di ambil dari dua sumber tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga sangat membantu untuk memperkuat data-data penelitian.

### **D. Tehnik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.<sup>62</sup>

Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang di gunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang

---

<sup>61</sup> Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87.

<sup>62</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas serta logis dengan cara mengaitkan berbagai data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan observasi dengan disertai cuplikan wawancara berupa kalimat langsung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan rasionalitas.

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>63</sup> Peneliti akan

---

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.<sup>64</sup> Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas.

## 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

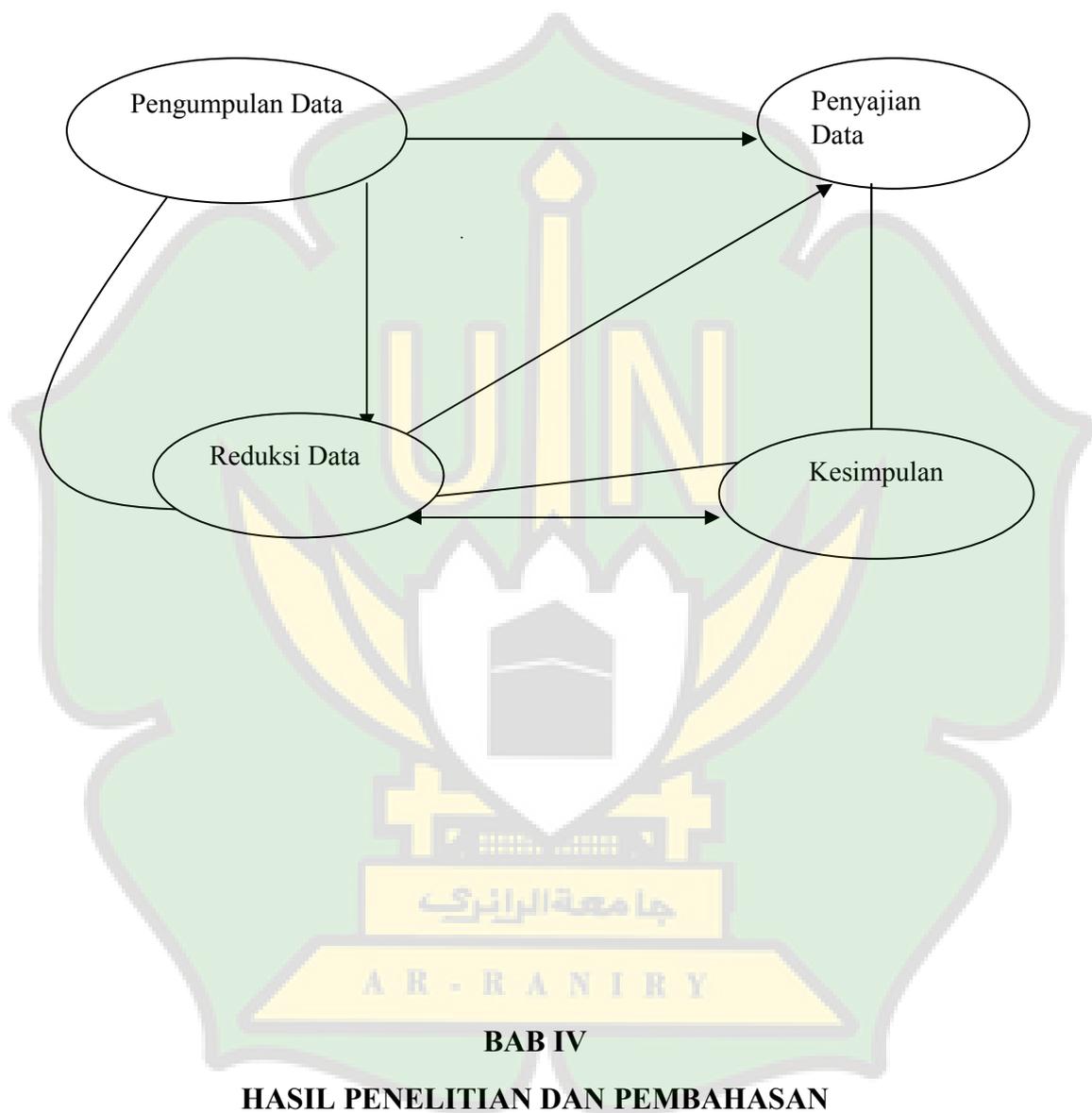
Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.<sup>65</sup> Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan

<sup>64</sup> *Ibid...* hal. 249.

<sup>65</sup> Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

Komponen Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman.<sup>66</sup>



## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 338

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral.<sup>67</sup>

Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.<sup>68</sup>

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui

---

<sup>67</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>68</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.<sup>69</sup>

Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP.

---

<sup>69</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi:

Menteri Kelautan dan Perikanan; Sekretaris Jenderal; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran; Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Inspektorat Jenderal; Badan Riset Kelautan dan Perikanan; Staf Ahli.<sup>70</sup>

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi: Menteri Kelautan dan Perikanan; Sekretaris Jenderal; Inspektorat Jenderal; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Badan Riset Kelautan dan Perikanan; Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; Staf Ahli.<sup>71</sup>

Tebentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan

---

<sup>70</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>71</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

*Pertama*, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

*Kedua*, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. *Ketiga*, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan Menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan Perubahan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

---

<sup>72</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.<sup>73</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Selatan adalah “Terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan Aceh selatan yang berkelanjutan menjupeningkatan ekonomi masyarakat.”<sup>74</sup>

Sedangkan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan adalah mempresentasikan sesuatu yang diemban dan harus dilaksanakan oleh dinas sesuai visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Misi yang telah diterapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan sarana dan Prasarana kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan, Pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan.
- c. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu dan Berkelanjutan.

---

<sup>73</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>74</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia kelautan dan perikanan yang Berbasis Teknologi.<sup>75</sup>

### **3. Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan yang Berkaitan dengan Perikanan**

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan. Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kegiatan pembinaan kepada panglima laot dan nelayan di Aceh Selatan.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan serta pembinaan dan pengembangan perikanan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan skala usaha perikanan budidaya
- 3) Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya melalui pendekatan teknologi budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan
- 4) Meningkatkan produksi melalui penerapan teknologi tepat guna.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

Adapun Sasaran dari Program ini adalah:

Terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan.

Yang menjadi output dari program ini adalah:

- 1) Pengadaan agroinput BBI Alue Paku
- 2) Terlaksananya pembangunan kolam pecontohan budidaya ikan air payau.
- 3) Terlaksananya pengadaan sarana UPR
- 4) Terlaksananya pembangunan kolam dan pengadaan agroinput budidaya air payau
- 5) Terlaksananya pembangunan kolam dan pengadaan agroinput budidaya ikan lele.<sup>77</sup>

Adapun outcome dari program ini adalah:

- 1) Meningkatnya fungsi dan produktivitas BBI Alue Paku.
  - 2) Meningkatnya pendampingan pembudidaya ikan.
  - 3) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan perikanan
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.<sup>78</sup>

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

---

<sup>76</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>77</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>78</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan
- 2) Pembangunan pelabuhan perikanan.

Tujuan dari program ini adalah:

- 1) Peningkatan pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap
- 2) Peningkatan kesejahteraan dan pengelolaah usaha perikanan
- 3) Penetapan kawasan penangkapan, sentra perikanan tangkap dan industri perikanan.<sup>79</sup>

Sasaran dari program ini adalah:

Terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Output kegiatan ini adalah:

- 1) Pengadaan sarana perikanan tangkap
- 2) Pengerukan kolam pelabuhan dan revertmen PPI Keude Bakongan
- 3) Pembangunan PPI Lhok Bengkuang, PPI Lhok Pawoh, PPI Sawang Ba'u, PPI Labuhan Tarok, PPI Keumumu Hilir, PPI Labuhanhaji, PPI Lhok Rukam, PPI Keude Bakongan.
- 4) Pembangunan jalan PPI Labuhanhaji
- 5) Pembangunan tempat perbaikan jaring

---

<sup>79</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

- 6) Pembangunan 'mstalasl air di PPI Labuhanhall, Keude Maukok, Labuhan Tarok, Lhok Pawoh,
- 7) Pembangunan Mushalla PPI Labuhanhaji
- 8) Rehab Docking PPI Keude Meukek
- 9) Pembangunan Fasilitas Fungsional Docking PPI Lhok Bengkuana
- 10) Tersedianya honor pemungut redistribusi PPI.<sup>80</sup>

Out Come dari program ini adalah:

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
- 2) Meningkatnya fungsi dan terlaksananya pemungutan redistribusi PPI
- 3) Tersedianya sarana perikanan tangkap.<sup>81</sup>

## **B. Deskripsi Keadaan Panglima Laot Kabupaten Aceh Selatan**

### **1. Gambaran Pangliman Laot Kabupaten Aceh Selatan**

Panglima Laot adalah lembaga adat yang keberadaannya diakui oleh masyarakat nelayan Aceh secara turun temurun sejak jaman kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Panglima Laot Lhok di Kabupaten Aceh Selatan saat ini berjumlah 20 orang jumlah ini sudah masuk 4 orang pengurus Kabupaten yaitu 1 orang Panglima Laot Kabupaten, 1 orang Wakil Panglima Laot Kabupaten, 1 orang Sekretaris dan 1 orang Bendahara.

---

<sup>80</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>81</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

Sejak tahun 2005 yang lalu Lembaga Panglima Laot Kabupaten Aceh Selatan ini telah dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sebuah lembaga adat yang terorganisir mulai dari Tingkat Provinsi, Kabupaten hingga tingkat Lhok. Namun ditingkat lapangan masih terdapat tingkatan yang lebih rendah lagi yakni Panglima Laot Teupin yang peranannya sangat menentukan ditengah-tengah masyarakat nelayan.<sup>82</sup>

Panglima Laot atau Panglima Laot Lhok merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Aceh dan juga di Aceh Selatan, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola hukum adat laot. Hukum adat laot dikembangkan berbasis Syariat Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antara nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu *Ulee Balang*, sekarang pemerintah daerah).

## **2. Tugas dan Fungsi**

Dalam melaksanakan fungsinya, adapun yang menjadi tugas dan fungsi panglima laot Aceh Selatan diantaranya:

- a. Memelihara dan mengawasal ketentuan-ketentuan Hukum Adat
- b. Melakukan Pengawasan setiap usaha penangkapan ikan di laut
- c. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya

---

<sup>82</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

- d. Mengurus dan menyelenggarakan upacara Adat Laot, seperti kenduri Laot dan upacara turun ke laut
- e. Menjaga kelestarian pantai dan laut
- f. Merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan Panglima Laot dengan Panglima Laot lainnya.<sup>83</sup>

Panglima Laot merupakan mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dimana berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dinas di bidang Perikanan Laut secara umum. Namun Panglima Laot saat ini belum seluruhnya dipilih secara demokrasi di antara para nelayan, sehingga keberadaan beberapa panglima laot lhok belum mengakar dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu pembinaan terutama pada proses pemilihan. Nama-nama Pengurus Panglima Laot Kabupaten dan Lhok dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>84</sup>

Tabel 3.1 Nama-nama Pengurus Panglima La'ot Kabupaten dan Panglima La'ot Lhok Tahun 2017

No	Nama Panglima Laot	Alamat	Jabatan
1	Khairuddin. CP	Rantau Binuang	Pabgiam la'ot kabupaten
2	Anwar	Samadua	Wakil Panglima La'ot Kabupaten I
3	Budiman Alfarisi	Bakongan	Wakil Panglima La'ot Kabupaten II
4	Jabal	Labuhanhaji	Sekretaris Panglima La'ot Kabupaten
5	Jasmudin	Trumon	Panglima La'ot Lhok Keude

<sup>83</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>84</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

			Trumon
6	Tgk.Zaini	Trumon	Panglima La'ot Lhok Buloh Seuma
7	M.Yatim	Bakongan Timur	Panglima La'ot Lhok Seubadeh
8	Muklis. G	Bakongan	Panglima La'ot Lhok Bakongan
9	Sartono	Kluet Selatan	Panglima La'ot Lhok Squad Bakong
10	M.Nour	Kluet Selatan	Panglima La'ot Lhok Rantau Binuang
11	Cut Meurah Hakim	Kluet Utara	Panglima La'ot Lhok Kuala Bau
12	Samsul Kamal	Pasi Raja	Panglima La'ot Lhok Pasi Raja
13	Taslim. Ws	Tapaktuan	Panglima La'ot Lhok Tapaktuan I
14	Safi' Jamal	Tapaktuan	Panglima La'ot Lhok Tapaktuan II
15	Mizanuddin	Samadua	Panglima La'ot Lhok Samadua I
16	Nopiman	Samadua	Panglima La'ot Lhok Samadua II
17	Muhajjar	Sawang	Panglima La'ot Lhok Sawang
18	M.Nazir,A.Md	Sawang	Panglima La'ot Lhok Sawang Ba'u
19	Imron Rusyadi	Meukek	Panglima La'ot Lhok Tarok
20	Aminuddin	Meukek	Panglima La'ot Lhok Keude Meukek

Sumber: *Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016*

### C. Keterlibatan Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot

Salah satu lembaga adat yang masih eksis di Aceh saat ini adalah Lembaga Panglima Laot, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Panglima Laot perlu dilanjutkan dan dipelihara secara maksimal baik oleh para panglima laot bersama

nelayan sendiri maupun dukungan yang lebih kuat lagi oleh pemerintah seiring dengan telah disahkannya Qanun Aceh Nomor 9 dan Nomor 10 tahun 2008 pada tanggal 30 Desember 2008 yang lalu tentang panglima laot.

Lembaga Panglima laot sangat di jaga dan dilestarikan apalagi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, dikarenakan lembaga panglima laot menjadi mitra pemerintah dalam memasok hasil tangkapan ikan untuk dapat di konsumsi oleh masyarakat Aceh Selatan, lembaga panglima laot menjadi lembaga yang membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui tangkapannya juga yang menjaga ekosistem lautan. Oleh sebab itu sangat penting melakukan pembinaan bagi panglima laot agar keberlasungan dan kelestarian laut dapat terjaga, maka oleh sebab itu ikatan seniergistas dari lembaga panglima laot dan pemerintah terus terjaga.<sup>85</sup>

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Selatan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan terus melakukan pembinaan bagi panglima laot, program ini menjadi kewajiban bagi Dinas Kelautan dan perikanan Aceh Selatan, hal ini telah di muatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dari UUPA.<sup>86</sup> Karena lahirnya qanun itu, setelah adanya perjuangan panjang dan advokasi secara terus menerus oleh para panglima laot. Dan saat ini sudah membuahkan hasil, di mana panglima laot secara tegas dan jelas diatur dan diakui keberadaannya dalam sistem perundang-

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

undangan Nasional sebagai salah satu lembaga adat yang masih hidup dan berkembang di Aceh Selatan.<sup>87</sup>

Dalam mewujudkan kelestarian panglima laot, Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh selatan terus melakukan pembinaan, pembinaan ini dilakukan selama kurun waktu 3 bulan dalam sekali pembinaan. Hal ini terus dilakukan secara rutin untuk dapat meningkatkan eksistensi dari panglima laot. Dalam proses pembinaan panglima laot, Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Selatan sangat aktif untuk melakukan pembinaan bagi panglima laot di wilayah Aceh Selatan.<sup>88</sup>

Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan melakukan teknik pembinaa seperti:

1. Teknik adaptif yaitu teknik berliku maksudnya adalah panglima laot mampu menyelesaikan masalah dengan mencari alternatif dan solusi lain.
2. Teknik Perencanaa, yaitu melakukan target dan tujuan dalam melakukan pembinaan yang diberikan perencanaan yang diarahkan dengan niat untuk tercapai tujuan bersama.
3. Teknik sistematis yaitu teknik yang terorganisasi dimana pembinaan yang dilakukan pilihan yang *raisonal* mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi.<sup>89</sup>

Dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat menitikberatkan pada penyelesaian sengketa adat laot oleh Panglima Laot

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan tgg. M.Jamil. S panglima laot pada tanggal 12 Desember 2018

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) bahwa ”penyelesaian sengketa adat meliputi penyelesaian sengketa adat di Gampong, Adat di Mukim dan Adat di Laot”. Kemudian qanun ini juga merincikan tata cara penyelesaian sengketa adat laot yang terjadi dikalangan nelayan di Aceh dimulai dengan penyelesaian pada tingkat lhok oleh panglima laot lhok dan apabila terjadi sengketa antar nelayan antar 2 panglima laot lhok tidak bisa diselesaikan oleh panglima laot lhok maka dapat diselesaikan oleh panglima kabupaten/kota (pasal 14 ayat (5, 6, 7 dan 8)).<sup>90</sup>

Berdasarkan pernyataan yang telah di berikan di atas, adanya Qanun Aceh ini dapat meningkatkan proses keberlangsungan panglima laot di wilayah Aceh Selatan, hal ini menjadi landasan kuat untuk terus melakukan pembinaan bagi panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan. Qanun ini juga telah di terapkan dalam kurun waktu 10 tahun yang lalau sejak di sahkannya pada tahun 2008. Adanya Qanun tersebut dapat menjadi landasan kuat untuk membina panglima laot di Aceh Selatan, landasan ini juga dalam membuat program yang mengarah kepada keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina panglima laot di Aceh Selatan.

#### **D. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot**

Untuk terus mempertahankan eksistensi dai panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Perikanan dan

---

<sup>90</sup> Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Kelautan melakukan pembinaan dan juga beberapa upaya dalam pembinaan yang dilakukan, seperti halnya pembinaan yang dilakukan rutin dalam kurun waktu 3 bulan sekali, pembinaan ini dilakukan dalam bentuk mendengarkan kasus-kasus yang terjadi dikalangan nelayan Aceh Selatan, juga mendengarkan keluhan panglima laot.<sup>91</sup> Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan diantaranya:

1. Melakukan pertemuan dengan panglima laot di seluruh Aceh Selatan selama 3 bulan dalam sekali pertemuan
2. Mendengarkan keluhan dan masalah-masalah yang dihadapi nelayan
3. Menyalurkan perlengkapan yang dibutuhkan nelayan seperti alat pancing dan sebagainya.
4. Membangun tempat penampungan ikan hasil tangkapan nelayan.

Pertemuan ini dilakukan untuk mendengarkan masalah-masalah atau keluhan dari apanglima laot dan di selesaikan melalui keputusan atau landasan yang telah di tetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dari UUPA. Setelah terselesaikan masalah dan keluhan nelayan maka akan diberikan perlengkapan yang telah termuat dalam program Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Selatan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan juga pembangunan pelabuhan perikanan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

Adapun tujuan dari implementasi program ini adalah untuk peningkatan pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, juga untuk peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan usaha perikanan, serta untuk penetapan kawasan penangkapan, sentra perikanan tangkap dan industri perikanan. Sasaran dari program ini untuk terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.<sup>93</sup>

Dalam prosesnya tujuan yang dimaksud selama ini telah memberikan hasil yang efektif dan efisien, hal ini akan terus dipertahankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, agar panglima laot dapat dibina dengan baik. Dengan penerapan manajemen yang baik yang dilakukan selama ini sehingga dapat meningkatkan hasil produksi ikan oleh nelayan yang ada di Aceh Selatan.

#### **E. Peluang dan Tantangan Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot**

Keputusan Adat Panglima Laot yang sudah berlaku secara turun temurun di kalangan masyarakat nelayan di Aceh dan juga di Aceh Selatan, di mulai pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) s/d sekarang. Hal ini terus berkembang selama terus dilakukan pembinaan, namun pada tahun 2008 telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dari UUPA. Adanya Qanun ini maka akan menjadi daya

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

dukung untuk terus berkembang, namun juga perlu pembinaan dari pemerintah setempat.<sup>94</sup>

Dalam melakukan pembinaan tentu saja ada peluang dan tantangan yang di hadapi, hal ini menjadi suatu dorongan dan juga masalah yang hasur di selesaikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, berikut ini merupakan peluang dan tantangan yang di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan dalam melakukan pembinaan bagi panglima laot di wilayah Aceh Selatan.

### **1. Peluang Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot**

Dalam pembinaan peluang menjadi motivasi atau dorongan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan dalam melakukan pembinaan bagi panglima laot di wilayah Aceh Selatan, diantara peluang tersebut adalah:

- a. Adanya kemauan yang kuat dari penglima laot untuk menyelesaikan masalah dan juga mau mengutarakan keluhan yang dihadapi.
- b. Adanya aturan seperti Qanun sehingga dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi panglima laot.<sup>95</sup>
- c. Kepala pemerintah daerah mendukung penuh upaya yang dilakukan untuk pembinaan panglima laot di wilayah Aceh Selatan.
- d. Hubungan kerjasama yang dilakukan selama ini sangat kuat sehingga melahirkan sinergi antar pemerintah dan panglima laot.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

Bila dicermati secara mendalam terhadap wewenang, tugas dan fungsi yang diembankan oleh panglima laot, setidaknya menunjukkan adanya peluang besar dalam meringankan tugas pemerintah dilaut. Tetapi sebaliknya, pemerintah juga harus peduli, tidak menutup mata terhadap keluhan, kendala dan semua persoalan mereka dilapangan dalam rangka menunjang amanah dari Qanun dan harapan masyarakat nelayan ini. Karena itu, perlu ada perhatian dan pembinaan lebih baik agar panglima laot tidak kalah ditaklukkan zaman.

## **2. Tantangan Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot**

Meskipun adanya peluang tidak terhindarkan juga dengan yang namanya tantangan, tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan untuk dapat menyelesaikan agar pembinaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik. Adapun tantangannya sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan merasakan sarana dan prasaranan untuk mendukung pembinaan yang dilakukan masih sangat terbatas, hal ini akan menghambat program kerja untuk terus membina panglima laot di wilayah Aceh Selatan.
- b. Komunikasi yang dibangun antar panglima laot dan dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan belum maksimal, hal ini dirasakan perlu untuk ditingkatkan, karena program Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan untuk turun kelapangan hanya 3 bulan sekali, sedangkan keluhan nelayan dirasakan hampir setiap bulan.<sup>97</sup>

Tantangan ini perlu diselesaikan segera oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan guna dapat melakukan pembinaan yang baik bagi nelayan dan dapat meningkatkan keberlangsungan panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan ini.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan sangat erat dimana Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan pembinaan secara rutin dalam kurun waktu 3 bulan sekali selain itu juga ikut dalam proses penyelesaian masalah yang di hadapi penglima laot dilapanagan.
2. Ada pun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan beragam, mulai dari pembinaan yang di lakukan dengan mendengarkan keluhan kesah dan juga ikut menyelesaikan permasalahan yang di hadapi panglima laot, juga ikut memberikan bantuan peralatan penangkapan ikan, serta membangun pelabuhan dan akan terus membangun komunikasi secara intens dengan panglima laot.

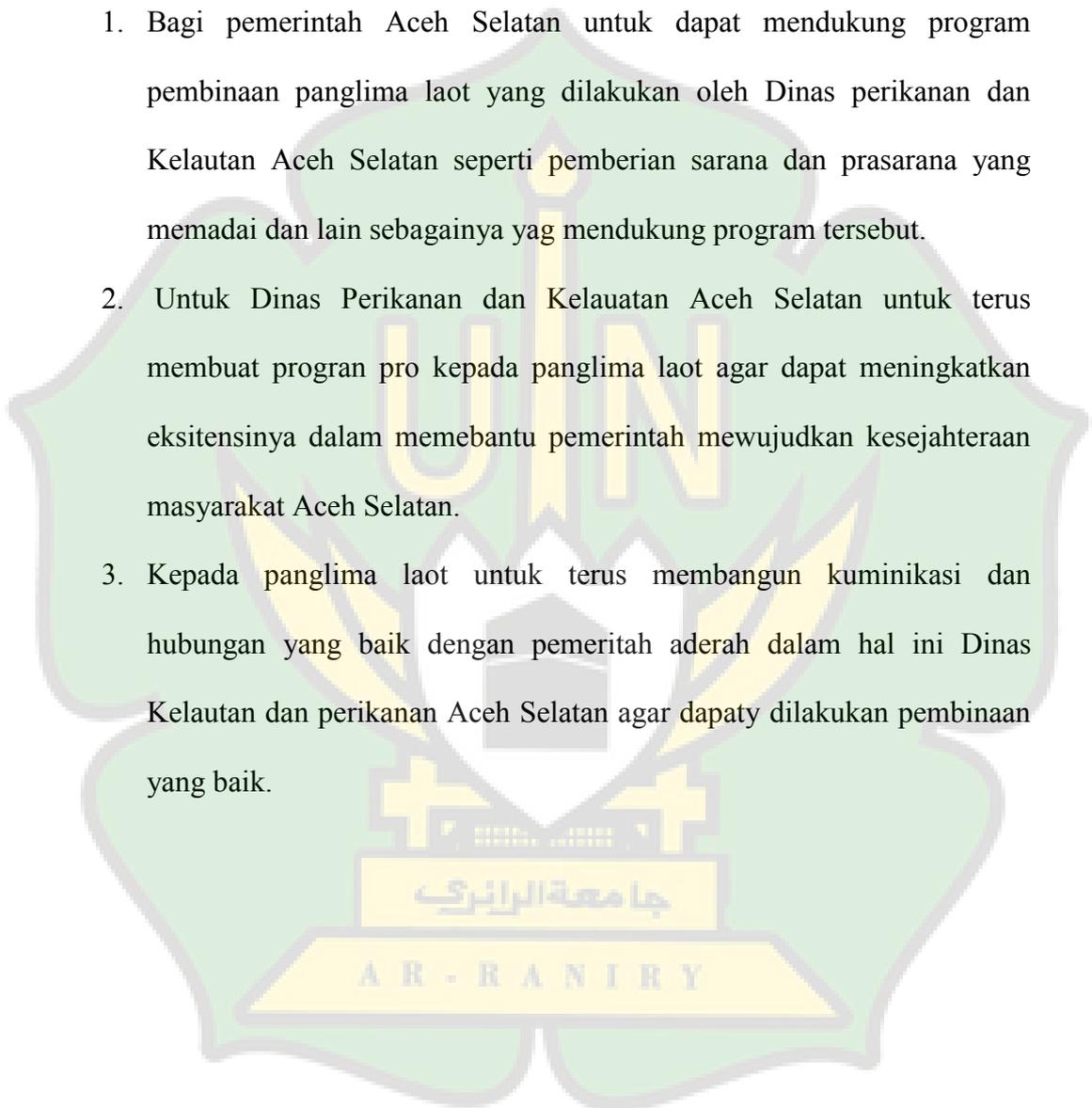
3. Sedangkan peluang dan tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan, peluangnya adanya kemauan yang kuat dari panglima laot untuk menyelesaikan masalah dan juga mau mengutarakan keluhan yang dihadapi, adanya aturan yang menguatkan seperti Qanun sehingga dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi panglima laot. Serta peluang dari Kepala pemerintah daerah yang mendukung penuh upaya yang dilakukan untuk pembinaan panglima laot di wilayah Aceh Selatan. Serta hubungan kerjasama yang baik yang dilakukan selama ini sehingga menguatkan untuk melahirkan sinergi antar pemerintah dan panglima laot.

Sedangkan tantangannya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan merasakan sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan yang dilakukan masih sangat terbatas, hal ini akan menghambat program kerja untuk terus membina panglima laot di wilayah Aceh Selatan. Dan juga komunikasi yang di bangun antar panglima laot dan dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan belum maksimal, hal ini dirasakan perlu untuk ditingkatkan, karena program Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan untuk turun kelapangan hanya 3 bulan sekali, sedangkan keluhan nelayan dirasakan hampir setiap bulan.

## B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi Pemerintah Gampong Cadek, pembaca dan penghuni rumah kost, diantaranya:

1. Bagi pemerintah Aceh Selatan untuk dapat mendukung program pembinaan panglima laot yang dilakukan oleh Dinas perikanan dan Kelautan Aceh Selatan seperti pemberian sarana dan prasarana yang memadai dan lain sebagainya yang mendukung program tersebut.
2. Untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Selatan untuk terus membuat program pro kepada panglima laot agar dapat meningkatkan eksistensinya dalam membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan.
3. Kepada panglima laot untuk terus membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan perikanan Aceh Selatan agar dapat dilakukan pembinaan yang baik.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Ummum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan**

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral.<sup>1</sup>

Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999

---

<sup>1</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.<sup>2</sup>

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.<sup>3</sup>

Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan

---

<sup>2</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>3</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi:

Menteri Kelautan dan Perikanan; Sekretaris Jenderal; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran; Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Inspektorat Jenderal; Badan Riset Kelautan dan Perikanan; Staf Ahli.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi: Menteri Kelautan dan Perikanan; Sekretaris Jenderal; Inspektorat Jenderal; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Badan Riset Kelautan dan

---

<sup>4</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

Perikanan; Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; Staf Ahli.<sup>5</sup>

Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

*Pertama*, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

*Kedua*, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. *Ketiga*, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi

---

<sup>5</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan Menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan Perubahan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.<sup>7</sup>

## **2. Visi dan Misi**

Visi dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Selatan adalah “Terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan Aceh selatan yang berkelanjutan menajupeningkatan ekonomi masyarakat.”<sup>8</sup>

Sedangkan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan adalah mempresentasikan sesuatu yang diemban dan harus dilaksanakan oleh dinas sesuai visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Misi yang telah diterapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>7</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>8</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

- a. Meningkatkan pembangunan sarana dan Prasarana kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan, Pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan.
- c. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu dan Berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia kelautan dan perikanan yang Berbasis Teknologi.<sup>9</sup>

### **3. Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan yang Berkaitan dengan Perikanan**

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan. Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kegiatan pembinaan kepada panglima laot dan nelayan di Aceh Selatan.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan serta pembinaan dan pengembangan perikanan bertujuan untuk:

---

<sup>9</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

- 1) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan skala usaha perikanan budidaya
- 3) Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya melalui pendekatan teknologi budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan
- 4) Meningkatkan produksi melalui penerapan teknologi tepat guna.<sup>10</sup>

Adapun Sasaran dari Program ini adalah:

Terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan.

Yang menjadi output dari program ini adalah:

- 1) Pengadaan agroinput BBI Alue Paku
- 2) Terlaksananya pembangunan kolam pecontohan budidaya ikan air payau.
- 3) Terlaksananya pengadaan sarana UPR
- 4) Terlaksananya pembangunan kolam dan pengadaan agroinput budidaya air payau
- 5) Terlaksananya pembangunan kolam dan pengadaan agroinput budidaya ikan lele.<sup>11</sup>

Adapun outcome dari program ini adalah:

- 1) Meningkatnya fungsi dan produktivitas BBI Alue Paku.

---

<sup>10</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>11</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

- 2) Meningkatnya pendampingan pembudidaya ikan.
- 3) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan perikanan

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.<sup>12</sup>

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan
- 2) Pembangunan pelabuhan perikanan.

Tujuan dari program ini adalah:

- 1) Peningkatan pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumberdava perikanan tangkap
- 2) Peningkatan kesejahteraan dan pengelolaah usaha perikanan
- 3) Penetapan kawasan penangkapan, sentra perikanan tangkap dan industri perikanan.<sup>13</sup>

Sasaran dari program ini adalah:

---

<sup>12</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>13</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

Terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Output kegiatan ini adalah:

- 1) Pengadaan sarana perikanan tangkap
- 2) Pengerukan kolam pelabuhan dan revertmen PPI Keude Bakongan
- 3) Pembangunan PPI Lhok Bengkuang, PPI Lhok Pawoh, PPI Sawang Ba'u, PPI Labuhan Tarok, PPI Keumumu Hilir, PPI Labuhanhaji, PPI Lhok Rukam, PPI Keude Bakongan.
- 4) Pembangunan jalan PPI Labuhanhaji
- 5) Pembangunan tempat perbaikan jaring
- 6) Pembangunan instalasi air di PPI Labuhanhall, Keude Maukok, Labuhan Tarok, Lhok Pawoh,
- 7) Pembangunan Mushalla PPI Labuhanhaji
- 8) Rehab Docking PPI Keude Meukek
- 9) Pembangunan Fasilitas Fungsional Docking PPI Lhok Bengkuana
- 10) Tersedianya honor pemungut redistribusi PPI.<sup>14</sup>

Out Come dari program ini adalah:

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
- 2) Meningkatnya fungsi dan terlaksananya pemungutan redistribusi PPI
- 3) Tersedianya sarana perikanan tangkap.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

## **B. Deskripsi Keadaan Panglima Laot Kabupaten Aceh Selatan**

### **1. Gambaran Pangliman Laot Kabupaten Aceh Selatan**

Panglima Laot adalah lembaga adat yang keberadaannya diakui oleh masyarakat nelayan Aceh secara turun temurun sejak jaman kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Panglima Laot Lhok di Kabupaten Aceh Selatan saat ini berjumlah 19 orang ditambah 4 orang pengurus Kabupaten yaitu 1 orang Panglima Laot Kabupaten, 1 orang Wakil Panglima Laot Kabupaten, 1 orang Sekretaris dan 1 orang Bendahara.

Sejak tahun 2005 yang lalu Lembaga Panglima Laot Kabupaten Aceh Selatan ini telah dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sebuah lembaga adat yang terorganisir mulai dari Tingkat Provinsi, Kabupaten hingga tingkat Lhok. Namun ditingkat lapangan masih terdapat tingkatan yang lebih rendah lagi yakni Panglima Laot Teupin yang perannya sangat menentukan ditengah-tengah masyarakat nelayan.<sup>16</sup>

### **2. Tugas dan Fungsi**

Dalam melaksanakan fungsinya, adapun yang menjadi tugas dan fungsi panglima laot Aceh Selatan diantaranya:

- a. Memelihara dan mengawasal ketentuan-ketentuan Hukum Adat
- b. Melakukan Pengawasan setiap usaha penangkapan ikan di laut
- c. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya

---

<sup>15</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>16</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

- d. Mengurus dan menyelenggarakan upacara Adat Laot, seperti kenduri Laot dan upacara turun ke laut
- e. Menjaga kelestarian pantai dan laut
- f. Merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan Panglima Laot dengan Panglima Laot lainnya.<sup>17</sup>

Panglima Laot merupakan mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dimana berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dinas di bidang Perikanan Laut secara umum. Namun Panglima Laot saat ini belum seluruhnya dipilih secara demokrasi di antara para nelayan, sehingga keberadaan beberapa panglima laot lhok belum mengakar dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu pembinaan terutama pada proses pemilihan. Nama-nama Pengurus Panglima Laot Kabupaten dan Lhok dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>18</sup>

Tabel 3.1 Nama-nama Pengurus Panglima La'ot Kabupaten dan Panglima La'ot Lhok Tahun 2017

---

<sup>17</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<sup>18</sup> Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016

<b>No</b>	<b>Nama Panglima Laot</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jabatan</b>
1	Khairuddin. CP	Rantau Binuang	Pabgliam la'ot kabupaten
2	Anwar	Samadua	Wakil Panglima La'ot Kabupaten I
3	Budiman Alfarisi	Bakongan	Wakil Panglima La'ot Kabupaten II
4	Jabal	Labuhanhaji	Sekretaris Panglima La'ot Kabupaten
5	Jasmudin	Trumon	Panglima La'ot Lhok Keude Trumon
6	Tgk.Zaini	Trumon	Panglima La'ot Lhok Buloh Seuma
7	M.Yatim	Bakongan Timur	Panglima La'ot Lhok Seubadeh
8	Muklis. G	Bakongan	Panglima La'ot Lhok Bakongan
9	Sartono	Kluet Selatan	Panglima La'ot Lhok Squad Bakong
10	M.Nour	Kluet Selatan	Panglima La'ot Lhok Rantau Binuang
11	Cut Meurah Hakim	Kluet Utara	Panglima La'ot Lhok Kuala Bau
12	Samsul Kamal	Pasi Raja	Panglima La'ot Lhok Pasi Raja
13	Taslim. Ws	Tapaktuan	Panglima La'ot Lhok Tapaktuan I
14	Safi'Jamal	Tapaktuan	Panglima La'ot Lhok Tapaktuan II
15	Mizanuddin	Samadua	Panglima La'ot Lhok Samadua I
16	Nopiman	Samadua	Panglima La'ot Lhok Samadua II
17	Muhajjar	Sawang	Panglima La'ot Lhok Sawang
18	M.Nazir,A.Md	Sawang	Panglima La'ot Lhok Sawang Ba'u
19	Imron Rusyadi	Meukek	Panglima La'ot Lhok Tarok

20	Aminuddin	Meukek	Panglima La'ot Lhok Keude Meukek
----	-----------	--------	-------------------------------------

Sumber: *Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan 2016*

### C. Keterlibatan Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot

Salah satu lembaga adat yang masih eksis di Aceh saat ini adalah Lembaga Panglima Laot, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Panglima Laot perlu dilanjutkan dan dipelihara secara maksimal baik oleh para panglima laot bersama nelayan sendiri maupun dukungan yang lebih kuat lagi oleh pemerintah seiring dengan telah disahkannya Qanun Aceh Nomor 9 dan Nomor 10 tahun 2008 pada tanggal 30 Desember 2008 yang lalu tentang panglima laot.

Lembaga Panglima laot sangat di jaga dan dilestarikan apalagi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, dikarenakan lembaga panglima laot menjadi mitra pemerintah dalam memasok hasil tangkapan ikan untuk dapat di konsumsi oleh masyarakat Aceh Selatan, lembaga panglima laot menjadi lembaga yang membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui tangkapannya juga yang menjaga ekosistem lautan. Oleh sebab itu sangat penting melakukan pembinaan bagi panglima laot agar keberlasungan dan kelestarian laut dapat terjaga, maka oleh sebab itu ikatan seniergistas dari lembaga panglima laot dan pemerintah terus terjaga.<sup>19</sup>

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Selatan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan terus melakukan pembinaan bagi panglima laot, program ini menjadi kewajiban bagi Dinas Kelautan dan perikanan Aceh Selatan, hal ini

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

telah di muatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dari UUPA.<sup>20</sup> Karena lahirnya qanun itu, setelah adanya perjuangan panjang dan advokasi secara terus menerus oleh para panglima laot. Dan saat ini sudah membuahkan hasil, di mana panglima laot secara tegas dan jelas diatur dan diakui keberadaannya dalam sistem perundang-undangan Nasional sebagai salah satu lembaga adat yang masih hidup dan berkembang di Aceh Selatan.<sup>21</sup>

Dalam mewujudkan kelestarian panglima laot, Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh selatan terus melakukan pembinaan, pembinaan ini dilakukan selama kurun waktu 3 bulan dalam sekali pembinaan. Hal ini terus dilakukan secara rutin untuk dapat meningkatkan eksistensi dari panglima laot. Dalam proses pembinaan panglima laot, Dinas Perikanan dan kelautan aceh selatan sangat aktif untuk melakukan pembinaan bagi panglima laot di wilayah Aceh Selatan.<sup>22</sup>

Dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat menitikberatkan pada penyelesaian sengketa adat laot oleh panglima laot sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) bahwa "penyelesaian sengketa adat meliputi penyelesaian sengketa adat di Gampong, Adat di Mukim dan Adat di Laot". Kemudian qanun ini juga merincikan tata cara penyelesaian sengketa adat laot yang terjadi dikalangan nelayan di Aceh dimulai dengan penyelesaian

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan tgg. M.Jamil. S panglima laot pada tanggal 12 Desember 2018

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

pada tingkat lhok oleh panglima laot lhok dan apabila terjadi sengketa antar nelayan antar 2 panglima laot lhok tidak bisa diselesaikan oleh panglima laot lhok maka dapat diselesaikan oleh panglima kabupaten/kota (pasal 14 ayat (5, 6, 7 dan 8)).<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan yang telah di berikan diatas, Adanya Qanun Aceh ini dapat meningkatkan proses keberlangsungan panglima laot di wilayah Aceh Selatan, hal ini menjadi landasan kuat untuk terus melakukan pembinaan bagi panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan. Qanun ini juga telah di terapkan dalam kurun waktu 10 tahun yang lalau sejak di sahkannya pada tahun 2008. Adanya Qanun tersebut dapat menjadi landasan kuat untuk membina panglima laot di Aceh Selatan, landasan ini juga dalam membuat program yang mengarah kepada keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina panglima laot di Aceh Selatan.

#### **D. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot**

Untuk terus mempertahankan kan eksitensi dai panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan pembinaan dan juga beberapa upaya dalam pebinaan yang dilakukan, seperti halnya pembinaan yang dilakukan rutin dalam kurun waktu 3 bulan sekali, pembinaan ini dilakukan dalam bentuk mendengarkan kasus-kasus

---

<sup>23</sup> Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat

yang terjadi dikalangan nelayan Aceh Selatan, juga mendengarkan keluhan panglima laot.<sup>24</sup>

Pertemuan ini dilakukan untuk mendengarkan masalah-masalah atau keluhan dari apanglima laot dan di selesaikan melalui keputusan atau landasan yang telah di tetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dari UUPA. Setelah terselesaikan masalah dan keluhan nelayan maka akan di berikan perlengkapan yang telah termuat dalam program Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Selatan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan juga pembangunan pelabuhan perikanan.<sup>25</sup>

Adapun tujuan dari implementasi program ini adalah untuk peningkatan pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, juga untuk peningkatan kesejahteraan dan pengelolaah usaha perikanan, serta untuk penetapan kawasan penangkapan, sentra perikanan tangkap dan industri perikanan. sasaran dari program ini untuk terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.<sup>26</sup>

Dalam prosesnya tujuan yang dimaksud selama ini telah memberikan hasil yang efektif dan efisien, hal ini akan terus dipertahankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, agar panglima laot dapat dibina dengan baik. Dengan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

penerapan manajemen yang baik yang dilakukan selama ini sehingga dapat meningkatkan hasil produksi ikan oleh nelayan yang ada di Aceh Selatan.

#### **E. Peluang dan Tantangan Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot**

Keputusan Adat Panglima Laot yang sudah berlaku secara turun temurun di kalangan masyarakat nelayan di Aceh dan juga di Aceh Selatan, di Mulai pada masa pemerintahan sultan Iskandar Muda (1607-1636) s/d sekarang. Hal ini terus berkembang selama terus dilakukan pembinaan, namun pada tahun 2008 telah di tetapkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dari UUPA. Adanya Qanun ini maka akan menjadi daya dukung untuk terus berkembang, namun juga perlu pembinaan dari pemerintah setempat.<sup>27</sup>

Dalam melakukan pembinaan tentu saja ada peluang dan tantangan yang di hadapi, hal ini menjadi suatu dorongan dan juga masalah yang hasur di selesaikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, berikut ini merupakan peluang dan tantangan yang di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan dalam melakukan pembinaan bagi panglima laot di wilayah Aceh Selatan.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

## **1. Peluang Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot**

Dalam pembinaan peluang menjadi motivasi atau dorongan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan dalam melakukan pembinaan bagi panglima laot di wilayah Aceh Selatan, diantara peluang tersebut adalah:

- a. Adanya kemauan yang kuat dari panglima laot untuk menyelesaikan masalah dan juga mau mengutarakan keluhan yang dihadapi.
- b. Adanya aturan seperti Qanun sehingga dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi panglima laot.<sup>28</sup>
- c. Kepala pemerintah daerah mendukung penuh upaya yang dilakukan untuk pembinaan panglima laot di wilayah Aceh Selatan.
- d. Hubungan kerjasama yang dilakukan selama ini sangat kuat sehingga melahirkan sinergi antar pemerintah dan panglima laot.<sup>29</sup>

Bila dicermati secara mendalam terhadap wewenang, tugas dan fungsi yang diembankan oleh panglima laot, setidaknya menunjukkan adanya peluang besar dalam meringankan tugas pemerintah dilaut. Tetapi sebaliknya, pemerintah juga harus peduli, tidak menutup mata terhadap keluhan, kendala dan semua persoalan mereka dilapangan dalam rangka menunjang amanah dari Qanun dan harapan masyarakat nelayan ini. Karena itu, perlu ada perhatian dan pembinaan lebih baik agar panglima laot tidak kalah ditaklukkan zaman.

## **2. Tantangan Dinas Kelautan Dalam Membina Panglima Laot**

Meskipun adanya peluang tidak terhindarkan juga dengan yang namanya tantangan, tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kelautan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Aceh Selatan pada tanggal 3 Desember 2018

dan Perikanan Aceh Selatan untuk dapat menyelesaikan agar pembinaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik. Adapun tantangannya sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan merasakan sarana dan prasaran untuk mendukung pembinaan yang dilakukan masih sangat terbatas, hal ini akan menghambat program kerja untuk terus membina panglima laot di wilayah Aceh Selatan.
- b. Komunikasi yang dibangun antar panglima laot dan dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan belum maksimal, hal ini dirasakan perlu untuk ditingkatkan, karena program Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan untuk turun kelapangan hanya 3 bulan sekali, sedangkan keluhan nelayan dirasakan hampir setiap bulan.<sup>30</sup>

Tantangan ini perlu diselesaikan segera oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan guna dapat melakukan pembinaan yang baik bagi nelayan dan dapat meningkatkan keberlangsungan panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan ini.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Aceh Selatan pada tanggal 5 Desember 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan sangat erat dimana Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan pembinaan secara rutin dalam kurun waktu 3 bulan sekali selain itu juga ikut dalam proses penyelesaian masalah yang di hadapi panglima laot dilapangan.
2. Ada pun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan beragam, mulai dari pembinaan yang di lakukan dengan mendengarkan keluhan kesah dan juga ikut menyelesaikan permasalahan yang di hadapi panglima laot, juga ikut memberikan bantuan peralatan penangkapan ikan, serta membangun pelabuhan dan akan terus membangun komunikasi secara intens dengan panglima laot.
3. Sedangkan peluang dan tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina Panglima laot di Kabupaten Aceh Selatan, peluangnya adanya kemauan yang kuat dari panglima laot untuk menyelesaikan masalah

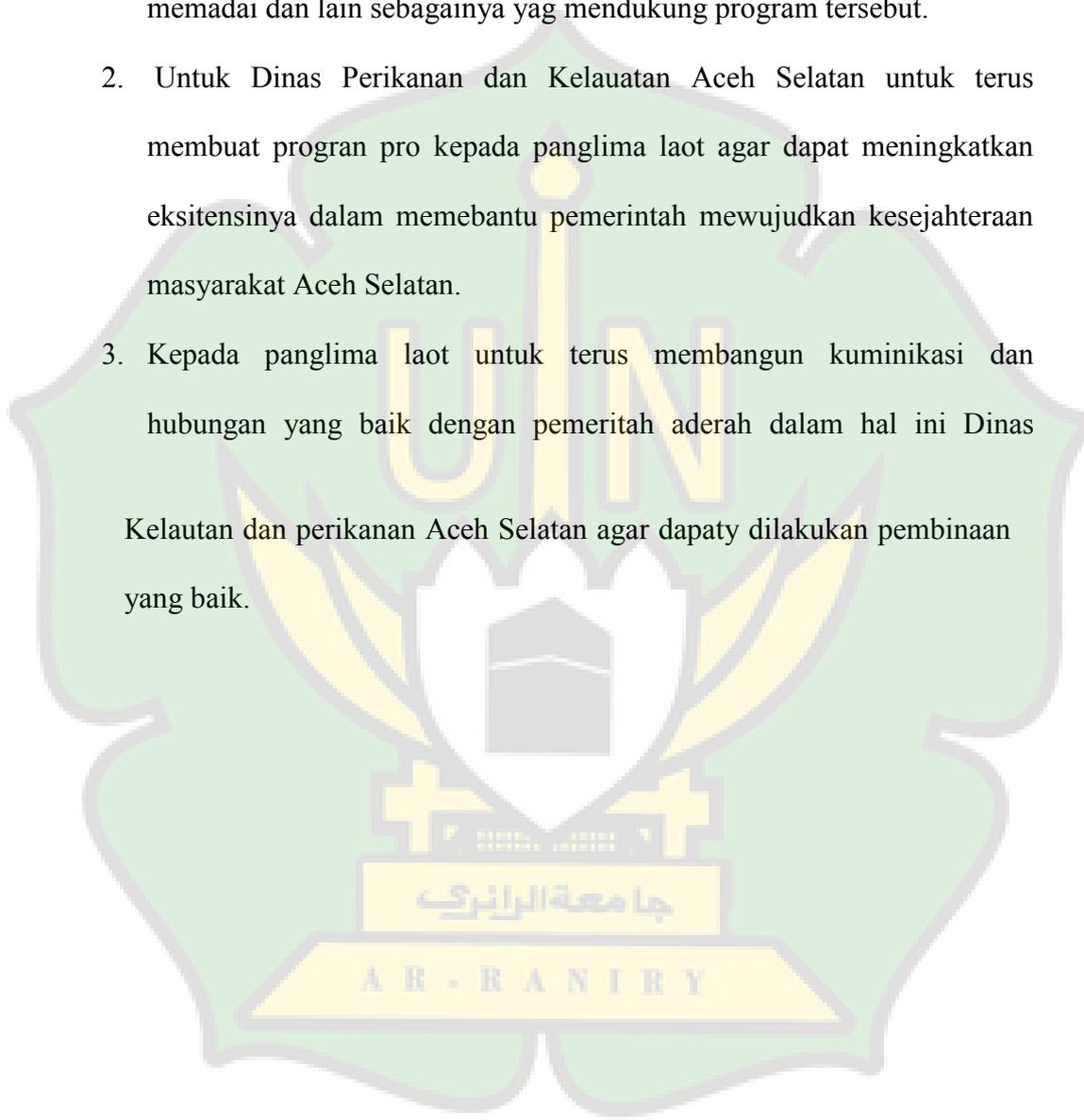
dan juga mau mengutarakan keluhan yang dihadapi, adanya aturan yang menguatkan seperti Qanun sehingga dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi panglima laot. Serta peluang dari Kepala pemerintah daerah yang mendukung penuh upaya yang dilakukan untuk pembinaan panglima laot di wilayah Aceh Selatan. Serta hubungan kerjasama yang baik yang dilakukan selama ini sehingga menguatkan untuk melahirkan sinergi antar pemerintah dan panglima laot.

Sedangkan tantangannya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan merasakan sarana dan prasaran untuk mendukung pembinaan yang dilakukan msaih sangat terbatas, hal ini akan menghambat program kerja untuk terus membina panglima laot di wilayah Aceh Selatan. Dan juga komunikasi yang di bangun antar panglima laot dan dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan belum maksimal, hal ini dirasakan perlu untuk ditingkatkan, karena program Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan untuk turun kelapangan hanya 3 bulan sekali, sedangkan keluhan nelayan dirasakan hampir setiap bulan.

#### **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran penulis sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi Pemerintah Gampong Cadek, pembaca dan penghuni rumah kost, diantaranya:

1. Bagi pemerintah Aceh Selatan untuk dapat mendukung program pembinaan panglima laot yang dilakukan oleh Dinas perikanan dan Kelautan Aceh Selatan seperti pemberian sarana dan prasarana yang memadai dan lain sebagainya yang mendukung program tersebut.
2. Untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Selatan untuk terus membuat program pro kepada panglima laot agar dapat meningkatkan eksistensinya dalam membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan.
3. Kepada panglima laot untuk terus membangun kuminikasi dan hubungan yang baik dengan pemeritah aderah dalam hal ini Dinas Kelautan dan perikanan Aceh Selatan agar dapaty dilakukan pembinaan yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budi Wibowo, dkk, *Sistem Pengetahuan Kenelayanan pada Masyarakat Nelayan Aceh Besar*, Banda Aceh: BKSNT, 2000
- Alfonsus Sirait, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 1995
- Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2002
- Andri Kurniawan, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Kota Sabang*, Jurnal, Vol 8, 3 September, 2008, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: CV. Baboen Jaya, 2013
- Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Malang: Intrans Publishing, 2013
- Ensiklopedia Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru , 1983
- Hasan Sadly, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pembangunan, 1980
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian*, Bandung: Rosda Karya, 2004
- M. Adli Abdullah, dkk, *Aceh Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan*, Banda Aceh: Pushal- KP, 2014
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial: Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Semarang: Toha Putra, 1973
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian Di Indinesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1991
- Miftah Toha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Miles Huberman,A.M, dan Saldana,J,*Qualitative Data Analysis*,Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press,*A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. USA: Sage Publications, 2014
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya), 2005

- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Reearch* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Fiskologi UGM, 1993
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008
- Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, jilid 1, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985
- Syamsudin Daud, *Adat Meulaot; Adat Menangkap Ikan di Laut*, Banda Aceh: Boebon Jaya, 2010
- Titit Lestari, *Sistem kerja Tradisional Nelayan Lampulo Banda Aceh: Jurnal Hasil Penelitian Kesenjaraan dan Nilai Tradisional*, dalam SUWA, Penyunting, Adnan Abdullah, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional , 2007
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka 2007
- Zahrina, Seri Informasi Budaya “Panglima Laot” Organisasi Kemaritiman Tradisional di Aceh, Banda Aceh: Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2014
- Alkausar M, *Keterancaman Ritual Mappandesasi dalam Masyarakat Nelayan Etnik Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara*. [tesis].dipublikasikan. Denpasar Universitas Udayana.hal 187. Dapat diunduh dari [http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-349-1033464347pdf%20tesis.pdf). diakses pada 29 Agustus 2018.
- BPP-PSPSL UNRI, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Kepulauan Riau*, 2008. Dapat diunduh dari: [http://www.coremap.or.id/downloads/kearifan\\_lokal\\_masyarakat\\_ds\\_sabang\\_mawang.pdf](http://www.coremap.or.id/downloads/kearifan_lokal_masyarakat_ds_sabang_mawang.pdf). diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.
- Diakses melalui <https://dkp.jatimprov.go.id/index.php/2017/04/10/tugas-pokok-dan-fungsi/> Pada tanggal, 29 November 2018
- Kusnadi, *Kebudayaan Masyarakat Nelayan; Prosiding Jelajah Budaya Nasional*, Yogyakarta, 2010 hal 1215, dapat diunduh melalui situs [http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Budaya\\_Masyarakat\\_Nelayan-Kusnadi.pdf](http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Budaya_Masyarakat_Nelayan-Kusnadi.pdf), diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.
- Usman Cut Raja, *Antara Panglima Laot dan Nelayan*, <http://www.acehnationalpost.com/opini/2483-antara-panglima-laot-dan-nelayan.html>, diakses pada 08 Oktober 2015.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak, apa pentingnya pembinaan panglima laot?
2. Selama ini bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan panglima laot?
3. Kapan pembinaan itu dilakukan?
4. Siapa saja yang melakukan pembinaan panglima laot?
5. Apa saja upaya yang bapak lakukan dalam pembinaan panglima laot?
6. Bagaimana cara Bapak melakukan pembinaan panglima laot?
7. Apa yang menjadi landasan/dasar bapak dalam membina panglima laot?
8. Apa saja yang Bapak lakukan supaya panglima laot dapat terbina dengan baik?
9. Apa saja peluang yang Bapak rasakan/dapatkan selama ini dalam melaksanakan pembinaan panglima laot?
10. Bagaimana cara bapak memanfaatkan peluang tersebut?
11. Apa saja hambatan yang Bapak rasakan/dapatkan selama ini dalam melaksanakan pembinaan panglima laot?
12. Bagaimmana cara bapak mengatasi hambatan tersebut?
13. Bagaimana hasil yang diperoleh selama ini dalam melakukan pembinaan panglima laot?
14. Apa yang menjadi harapan bapak panglima laot?

## Wawancara dengan Panglima Laot

1. Menurut bapak apa pentingnya pembinaan panglima laot dari dinas Kelautan?
2. Apakah selama ini bapak merasakan pembinaan yang dilakukan oleh dinas Kelautan?
3. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh dinas Kelautan?
4. Apa perbaikan yang telah bapak rasakan dari hasil pembinaan yang dilakukan selama ini?
5. Apa harapan bapak terhadap Dinas Kelautan Aceh Selatan?



## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ade Daman Huri  
Tempat/Tgl Lahir : Lhok Pawoh, 21 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Lhok Pawok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

### Nama orang tua:

- a. Ayah : Darmansyah
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Ibu : Siti Sara
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Lhok Pawok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

### Riwayat Pendidikan:

- a. SD Negeri 1 Lhok Pawoh, lulus tahun 2007
- b. SMPN 1 Sawang, lulus tahun 2010
- c. SMK N 1 Sawang lulus tahun 2013
- d. UIN Ar-Raniry Fak Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, lulus tahun 2019

Banda Aceh, 11 Januari 2019  
Penulis,

**Ade Daman Huri**